

Komponen kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Peningkatan kapasitas daerah salah satunya dilakukan dengan perwujudan kalurahan tangguh bencana dan satuan pendidikan aman bencana. Pencapaian kalurahan tangguh bencana sampai dengan tahun 2020 sebanyak 35 kalurahan dari 75 kalurahan atau baru mencapai 46,67%. Sedangkan pencapaian Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sebanyak 23 atau sebesar 4,51%.

Potensi tingkat risiko bencana pada 9 (sembilan) jenis bencana adalah tingkat risiko rendah, sedang dan tinggi.

Tabel 2 8 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Jenis Ancaman	Luas Ancaman		Jumlah Penduduk Terpapar		Nilai Kerugian		Tingkat Kapasitas Daerah	Tingkat risiko
		Ha	Kelas	Jiwa	Kelas	Milyar	Kelas	Kelas	
1	Gempa Bumi	6.978	Tinggi	93.414	Sedang	8.417	Sedang	Rendah	Sedang
2	Longsor	6.874	Tinggi	63.369	Sedang	5.629	Sedang	Rendah	Sedang
3	Banjir	15.068	Tinggi	24.558	Sedang	24.104	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	799	Tinggi	7.031	Rendah	651	Rendah	Rendah	Rendah
5	Kekeringan	11.225	Tinggi	93.460	Sedang	13	Rendah	Rendah	Rendah
6	Cuaca Ekstrim	44.768	Tinggi	692.936	Tinggi	53.486	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Tsunami	3.384	Tinggi	34.735	Sedang	1.751	Sedang	Rendah	Sedang
8	Kebakaran	11.727	Tinggi	94.878	Sedang	22.173	Tinggi	Rendah	Tinggi
9	Epidemi dan Wabah penyakit	50.685	Sedang	945.441	Tinggi	317*	Rendah	Rendah	tinggi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Keterangan : * angka sementara, belum memperhitungkan kerugian yang dirasakan/dialami masyarakat

Jenis bencana tidak hanya bencana alam, namun bencana non alam juga berpotensi menjadi ancaman. Hal ini terbukti dengan terjadinya pandemi Covid-19. Sejak awal Maret 2020, wilayah Kabupaten Bantul mulai dilanda wabah Covid-19 dan terus bertambah menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Bantul bahkan pada bulan Maret 2021 tiga wilayah kapanewon terkonfirmasi lebih dari 1000 kasus yaitu Kapanewon Banguntapan, Sewon, dan Kasihan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat karena mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan, meskipun pada sektor tertentu ada dampak positif yang diperoleh seperti sektor informasi dan komunikasi. Luasnya sektor kehidupan yang terdampak menjadikan tidak mudah dalam mengidentifikasi atau menghitung jumlah kerugian yang ditimbulkan. Namun, melalui pendekatan kondisi perekonomian makro daerah, kerugian dampak Pandemi Covid-19 dapat tergambar dari pertumbuhan PDRB . Merujuk pada hal tersebut, maka selama pandemi Covid-19 (2019-2020) telah menyebabkan penurunan PDRB sebesar Rp317,140 Milyar. Selanjutnya apabila dilihat dari sisi pendapatan daerah ada penurunan sebesar Rp30,64 Milyar. Sementara untuk kerugian yang dirasakan/dialami masyarakat setiap sektor belum dapat terhitung secara detil karena luasnya dampak yang ditimbulkan

Tingkat risiko bencana per kapanewon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 9 Tingkat Risiko Bencana Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Kapanewon	Risiko								
		Kebakaran	Banjir	Tsunami	Gempa bumi	Tanah Longsor	Kekeringan	Cuaca Ekstrim	Gel. Ekstrim Dan Abrasi	Epidemi dan Wabah Penyakit *
1.	Pajangan	Rendah	Rendah		Rendah	Rendah	Rendah	Rendah		Rendah
2.	Pandak	Rendah	Rendah		Rendah	Rendah	Rendah	Rendah		Sedang
3.	Sedayu	Rendah	Rendah		Rendah	Rendah	Rendah	Rendah		Sedang
4.	Sanden	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Sedang
5.	Dlingo	Sedang	Rendah		Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah		Sedang
6.	Sewon	Tinggi	Rendah		Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi		Sedang

No	Kapanewon	Risiko								
		Kebakaran	Banjir	Tsunami	Gempa bumi	Tanah Longsor	Kekeringan	Cuaca Ekstrem	Gel. Ekstrem Dan Abrasi	Epidemi dan Wabah Penyakit *
7.	Srandakan	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang
8.	Kasihani	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi		Tinggi
9.	Imogiri	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi		Sedang
10.	Pleret	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi		Tinggi
11.	Bantul	Sedang	Tinggi		Sedang	Rendah	Rendah	Tinggi		Tinggi
12.	Pundong	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Rendah	Tinggi	Tinggi		Sedang
13.	Kretek	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Sedang
14.	Bambanglipuro	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi		Sedang
15.	Piyungan	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi		Rendah
16.	Jetis	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi		Tinggi
17.	Banguntapan	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi		Tinggi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Keterangan: * Data covid 19 di Kabupaten Bantul per 31 Desember 2020

2.1.4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2016 menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul adalah 928.676 jiwa dan cenderung meningkat mencapai 954.706 jiwa pada tahun 2020. Dihitung dari nilai totalnya, pertumbuhan penduduk di tahun 2020 adalah sebesar 0,57%.

Tabel 2 10 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kapanewon

No	Kapanewon	2016				2017				2018				2019				2020				Pertumbuhan 2020 (%)	Proporsi 2020 (%)
		L	P	Jumlah	Sex Ratio	L	P	Jumlah	Sex Ratio	L	P	Jumlah	Sex Ratio	L	P	Jumlah	Sex Ratio	L	P	Jumlah	Sex Ratio		
1	Kretek	15232	15850	31082	96.10	15061	15776	30837	95.47	15099	15756	30855	95.83	15101	15762	30863	95.81	15076	15688	30764	96.10	-0,32%	3,2
2	Srandakan	15590	15654	31244	99.59	15551	15725	31276	98.89	15522	15642	31164	99.23	15505	15713	31218	98.68	15475	15607	31082	99.15	-0,44%	3,3
3	Sanden	16085	16409	32494	98.03	15755	16169	31924	97.44	15747	16220	31967	97.08	15763	16209	31972	97.25	15713	16097	31810	97.61	-0,51%	3,3
4	Pundong	17554	17930	35484	97.90	17456	17992	35448	97.02	17503	18165	35668	96.36	17658	18250	35908	96.76	17587	18079	35666	97.28	-0,67%	3,7
5	Pajangan	17409	17265	34674	100.83	17467	17427	34894	100.23	17691	17774	35465	99.53	18000	18040	36040	99.78	18271	18280	36551	99.95	1,42%	3,8
6	Diingo	19401	19625	39026	98.86	19188	19314	38502	99.35	19463	19629	39092	99.15	19649	19888	39537	98.80	19872	20126	39998	98.74	1,17%	4,2
7	Bambanglipuro	20498	20887	41385	98.14	20326	20875	41201	97.37	20551	21070	41621	97.54	20673	21207	41880	97.48	20620	21086	41706	97.79	-0,42%	4,4
8	Sedayu	23155	22898	46053	101.12	23109	23043	46152	100.29	23507	23546	47053	99.83	23754	23892	47646	99.42	24046	24110	48156	99.73	1,07%	5,0
9	Pleret	23610	23053	46663	102.42	23590	23235	46825	101.53	23906	23953	47859	99.80	24246	23924	48170	101.35	24430	24067	48497	101.51	0,68%	5,1
10	Pandak	25986	25784	51770	100.78	25820	25672	51492	100.58	25981	25800	51781	100.70	26112	25901	52013	100.81	26118	25918	52036	100.77	0,04%	5,5
11	Piyungan	25463	25383	50846	100.32	25490	25561	51051	99.72	25714	25978	51692	98.98	26041	26292	52333	99.05	26320	26542	52862	99.16	1,01%	5,5
12	Jetis	28650	28824	57474	99.40	28540	28868	57408	98.86	28906	29300	58206	98.66	29111	29438	58549	98.89	29237	29394	58631	99.47	0,14%	6,1
13	Imogiri	31247	31172	62419	100.24	31168	31363	62531	99.38	31442	31737	63179	99.07	31583	31959	63542	98.82	31730	32105	63835	98.83	0,46%	6,7
14	Bantul	31548	31576	63124	99.91	31230	31558	62788	98.96	31637	32032	63669	98.77	31988	32377	64365	98.80	32146	32506	64652	98.89	0,45%	6,8
15	Sewon	49084	48336	97420	101.55	48760	48274	97034	101.01	49463	49043	98506	100.86	50183	49624	99807	101.13	50539	50024	100563	101.03	0,76%	10,5
16	Kasihan	50397	49933	100330	100.93	50152	50070	100222	100.16	51055	51120	102175	99.87	51749	51778	103527	99.94	52215	52384	104599	99.68	1,04%	11
17	Banguntapan	53951	53957	107908	99.99	53786	53810	107596	99.96	54948	55178	110126	99.58	55800	56155	111955	99.37	56476	56822	113298	99.39	1,20%	11,9
Jumlah		464860	464536	929396	100.07	462449	464732	927181	99.51	5E+05	471943	940078	99.19	472916	476409	949325	99.27	475871	478835	954706	99.38	0,57%	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Di tahun 2020, pertumbuhan penduduk yang tertinggi ada di Kapanewon Pajangan (1,42%), Kapanewon Banguntapan (1,20%), dan Dlingo (1,17%). Jumlah penduduk terbanyak ada di Kapanewon Banguntapan (11,9%), Kasihan (11%) dan Sewon (10,5%). Hal ini terjadi karena ketiga kapanewon tersebut berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal di lokasi tersebut. Sedangkan penduduk yang paling sedikit ada di Kapanewon Kretek (3,2%), Srandakan (3,3%) dan Sanden (3,3%).

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin diperlukan guna menentukan kebijakan yang berprespektif *gender*. Dari sisi *sex ratio*, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Bantul lebih besar daripada lelaki. Di tahun 2020, kapanewon yang memiliki *sex ratio* di atas 100% (lelaki lebih banyak daripada perempuan) ada di Kapanewon Pandak (100,49%), Pleret (101,64%) dan Sewon (100,94%). Dari sisi *sex ratio* ini sangat jelas bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan harus dioptimalkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam bidang pemerintahan dan kesejahteraan keluarga untuk pengentasan kemiskinan.

Tabel 2 11 Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul

No	Kapanewon	Kepadatan (jiwa/km ²)					
		2016	2017	2018	2019	2020	Rerata
1	Dlingo	692	689	700	705	715	700
2	Pajangan	1.043	1.049	1.067	1.076	1.099	1.066
3	Imogiri	1.146	1.148	1.159	1.164	1.171	1.157
4	Kretek	1.161	1.152	1.153	1.154	1.149	1.153
5	Sedayu	1.340	1.343	1.369	1.381	1.401	1.366
6	Sanden	1.403	1.378	1.380	1.381	1.373	1.383
7	Pundong	1.498	1.497	1.506	1.510	1.506	1.503
8	Piyungan	1.563	1.569	1.589	1.601	1.624	1.589
9	Srandakan	1.705	1.707	1.701	1.704	1.696	1.702
10	Bambanglipuro	1.823	1.815	1.834	1.840	1.837	1.829

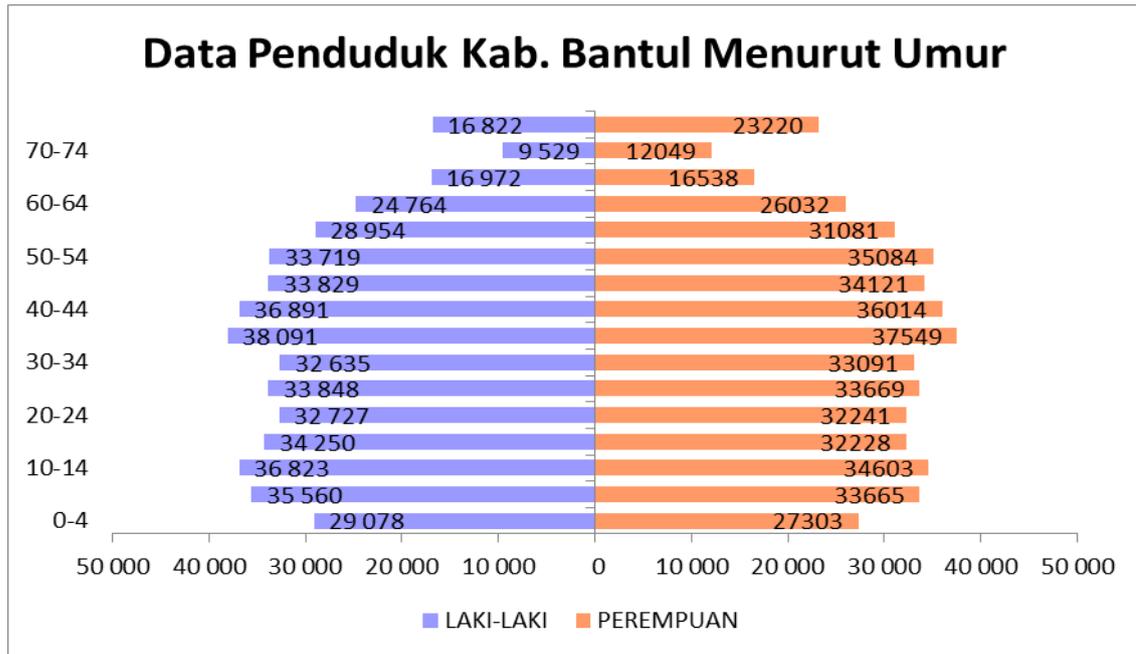
No	Kapanewon	Kepadatan (jiwa/km ²)					
		2016	2017	2018	2019	2020	Rerata
11	Pleret	2.031	2.039	2.068	2.083	2.111	2.066
12	Pandak	2.130	2.119	2.131	2.137	2.141	2.131
13	Jetis	2.349	2.346	2.379	2.387	2.396	2.371
14	Bantul	2.876	2.861	2.901	2.915	2.945	2.899
15	Kasih	3.099	3.095	3.156	3.180	3.230	3.152
16	Sewon	3.587	3.573	3.627	3.655	3.702	3.628
17	Banguntapan	3.776	3.778	3.867	3.906	3.978	3.861
Rerata		1.954	1.950	1.976	1.987	2.004	1.974

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021.

Dilihat dari tabel di atas kepadatan penduduk dan penyebaran penduduk belum merata. Rerata tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.974 jiwa per km² dengan standar deviasi sebesar 914 jiwa per km².

Di tahun 2020, kepadatan penduduk tertinggi ada di 3 (tiga) wilayah kapanewon yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yaitu Kapanewon Banguntapan (3.861 jiwa/km²), Sewon (3.628 jiwa/km²), dan Kasihan (3.152 jiwa/km²). Sementara itu kepadatan penduduk geografis terendah ada di Kapanewon Dlingo (700 jiwa/km²).

Dari data dapat dilihat bahwa peningkatan kepadatan penduduk hampir terjadi di semua kapanewon. Hal ini perlu diwaspadai karena dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk akan menyebabkan masalah penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, disamping juga akan berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021, diolah

Gambar 2 19 Piramida Penduduk Kabupaten Bantul 2021

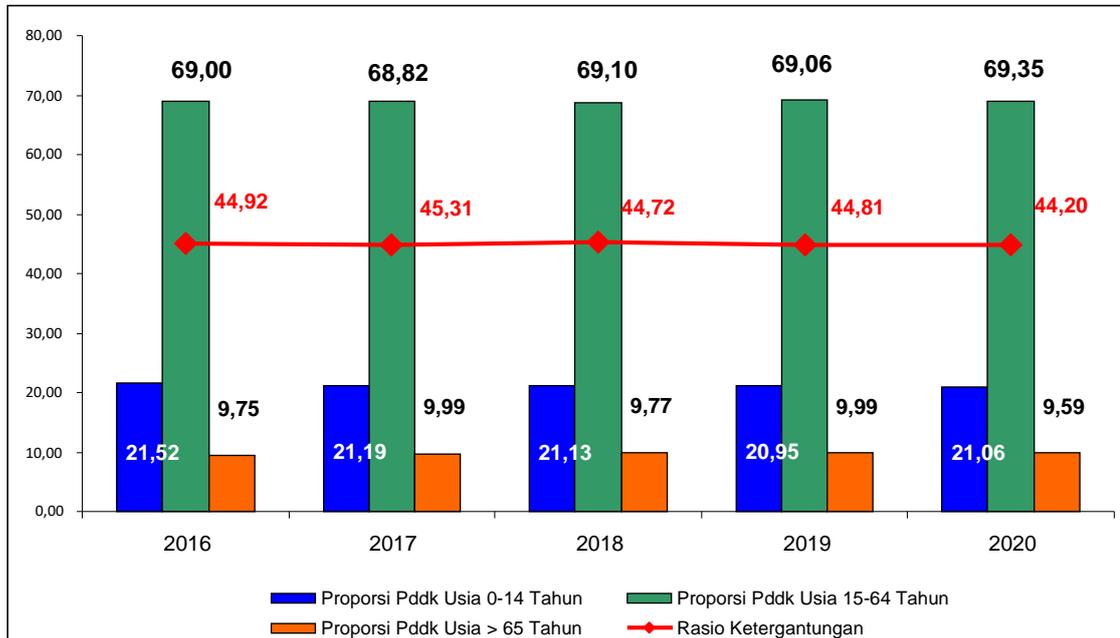
Komposisi Penduduk menurut kelompok usia adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.19. Data di tabel tersebut menunjukkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Bantul didominasi oleh penduduk usia sekolah dan usia produktif, sehingga diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul terkait pendidikan dan ketenagakerjaan.

Kondisi dimana jumlah penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun) meningkat sedangkan jumlah usia yang tidak produktif (0-14 tahun dan di atas 64 tahun) menurun dapat dikatakan Kabupaten Bantul berada dalam masa bonus demografi sehingga dapat menikmati dekade *Window of Opportunity* atau jendela kesempatan.

Pemanfaatan peluang ini dapat terjadi dengan prasyarat, antara lain jika iklim investasi kondusif untuk membuka kesempatan kerja produktif serta terdapat sumber daya pemerintah untuk investasi pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.

Upaya pemanfaatan peluang tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan peluang untuk

menaikkan taraf hidup rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021, diolah.

Gambar 2 20 Komposisi Penduduk menurut Usia Kabupaten Bantul 2016-2020

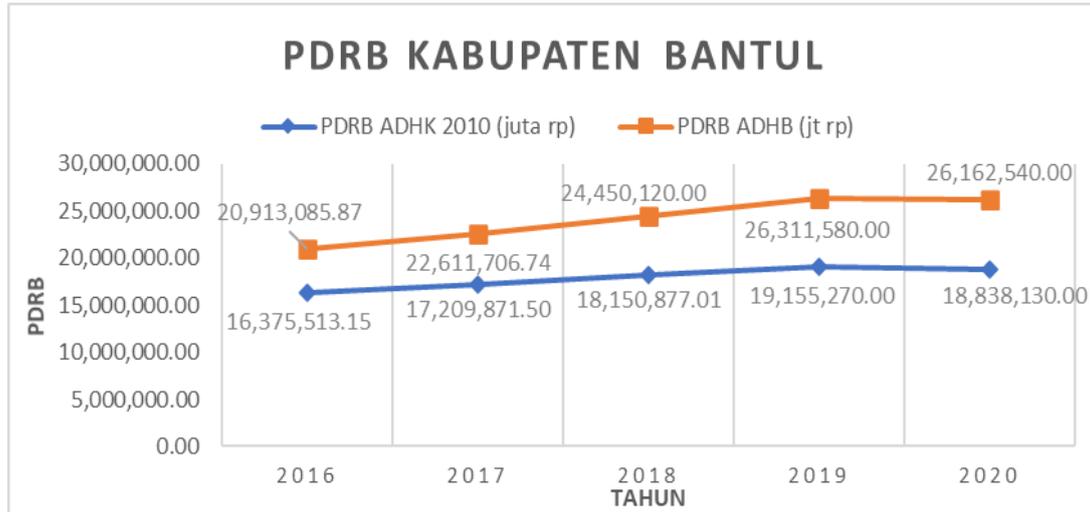
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memuat kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Bantul berdasarkan indikator yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan target serta capaian RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut:

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan PDRB dapat menggambarkan kinerja pembangunan dan transformasi struktural perekonomian. PDRB Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Peningkatan ini terjadi pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) maupun dengan menggunakan perhitungan harga konstan (PDRB riil). Apabila dicermati angka-angkanya, peningkatan ini dapat dikatakan

signifikan dengan rata-rata 1,3 triliun rupiah per tahun untuk PDRB atas harga berlaku, dan rata-rata peningkatan sebesar 0,61 triliun untuk PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. Grafik di bawah ini menunjukkan perkembangan PDRB baik nominal maupun riil pada periode 2016-2020.



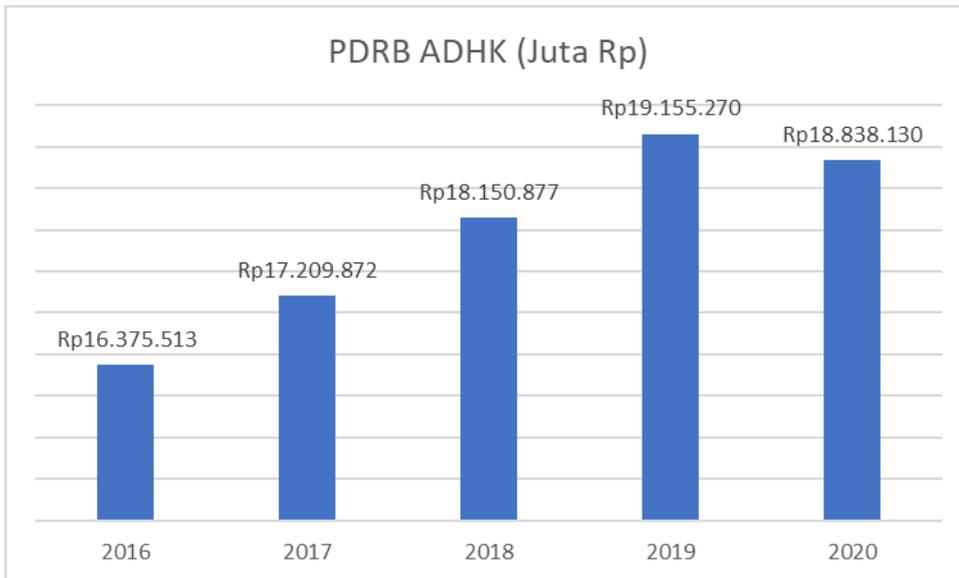
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2.21 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Gambar di atas menunjukkan bahwa peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku antara tahun 2018-2019 (periode satu tahun) telah mencapai 1,86 triliun rupiah. Pencapaian PDRB tahun 2019 ini merupakan PDRB yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Grafik PDRB yang menggunakan perhitungan atas dasar harga konstan, polanya tidak jauh berbeda dengan yang dihitung menggunakan harga berlaku. Periode 2016-2019 mengalami peningkatan dan PDRB tahun 2019 merupakan capaian tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Antara tahun 2018-2019 tercapai peningkatan sebesar 1,0 triliun rupiah.

Jika diperhatikan berdasar atas harga konstan perkembangan dari tahun 2016 sampai dengan 2020, besarnya PDRB mengikuti tren yang berbentuk kuadratik. Besarnya PDRB mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19. Dengan demikian pada

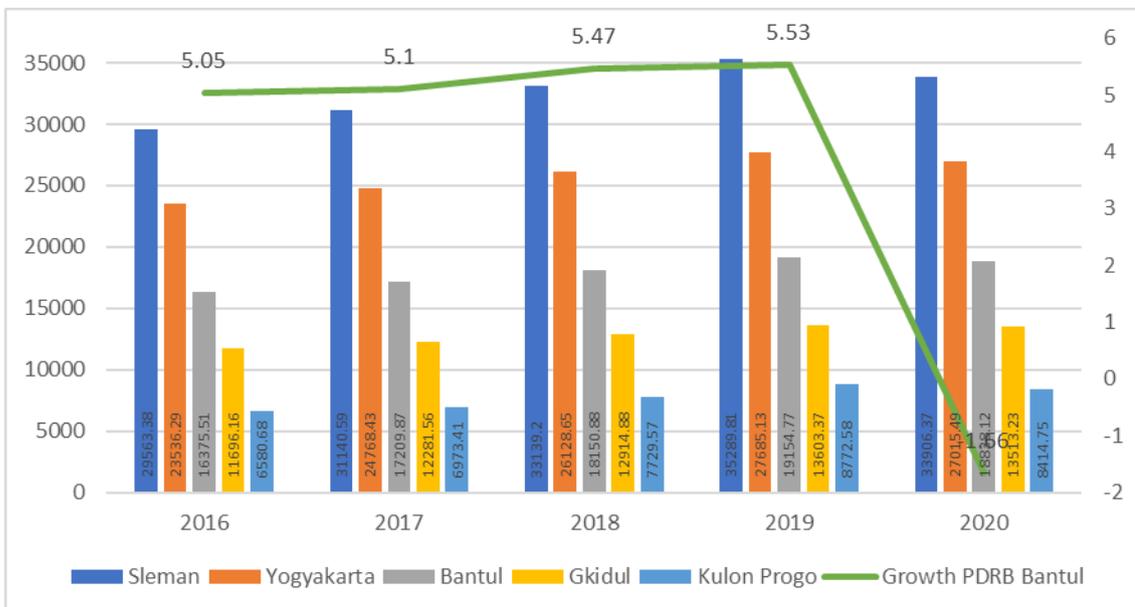
tahun 2021 dan selanjutnya perlu diambil tindakan antisipasi agar penurunannya tidak semakin besar.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2 22 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Konstan 2010

Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di DIY dalam rentang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber:Tabel Dinamis, BPS, 2021

Gambar 2 23 Perkembangan PDRB (milyar) ADHK 2010 Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di DIY 2016-2020

Secara umum kontribusi Kabupaten Bantul dalam pembentukan PDRB DIY berada dalam posisi ketiga setelah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Dalam rentang tahun 2016-2020, rerata kontribusi Kabupaten Bantul dalam pembentukan PDRB DIY adalah sebesar 18,53%, kontribusi Sleman sebesar 33,66% dan kontribusi Kota Yogyakarta sebesar 26,67%. Sedangkan kontribusi kabupaten Gunungkidul pada pembentukan PDRB DIY adalah sebesar 13,22% dan kontribusi Kulonprogo sebesar 7,91%. Pola kontribusi semua kabupaten/kota tersebut cenderung stabil dalam rentang tahun 2016-2020.

Apabila PDRB dilihat dengan menggolongkan lapangan usahanya, maka dengan menggunakan pengelompokan 17 sektor hasil perhitungan PDRB dapat dilihat pada tabel berikut ini.

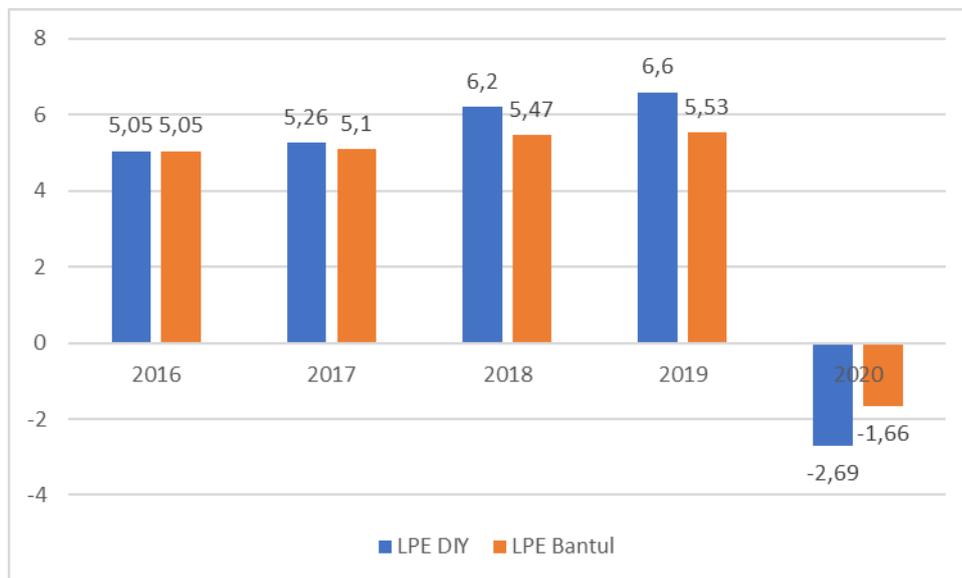
Tabel 2 12 Perkembangan Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha dalam (%)

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,33	13,85	13,63	13,07	14,12
2	Pertambangan dan Penggalian	0,61	0,57	0,54	0,51	0,47
3	Industri Pengolahan	15,21	15,25	15,22	15,18	14,84
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
6	Konstruksi	9,29	9,38	9,72	9,75	8,5
7	Perdag. dan Reparasi Mobil dan Motor	8,47	8,61	8,69	8,65	8,46
8	Transportasi dan Pergudangan	4,79	4,74	4,72	4,85	4,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,67	11,73	11,69	11,92	10,73
10	Informasi dan Komunikasi	7,32	7,38	7,32	7,27	8,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,8	2,77	2,83	2,94	2,88
12	Real Estate	6,58	6,57	6,56	6,71	6,9
13	Jasa Perusahaan	0,48	0,48	0,47	0,49	0,43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	7,55	7,77	7,73	7,63	7,72
15	Jasa Pendidikan	6,87	6,82	6,8	6,9	7,39
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,85	1,85	1,81	1,85	2,28
17	Jasa-jasa Lainnya	1,98	2,01	2,04	2,05	1,86
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada tiga lapangan usaha yang kontribusinya relatif besar dibanding dengan lapangan usaha yang lainnya. Ketiga lapangan usaha tersebut adalah pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; dan penyediaan akomodasi dan makan minum; yang masing-masing berkisar kurang lebih 14 persen, 15 persen dan 11 persen. Pada tahun 2016-2020 sektor pertanian dan industri pengolahan menunjukkan kontribusi yang menurun secara bertahap (kecuali sektor pertanian tahun 2020, mengalami sedikit peningkatan).

Pertumbuhan ekonomi yang positif juga menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di suatu daerah mengalami peningkatan. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut mengalami peningkatan pula. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul disandingkan dengan DIY tahun 2016-2020.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

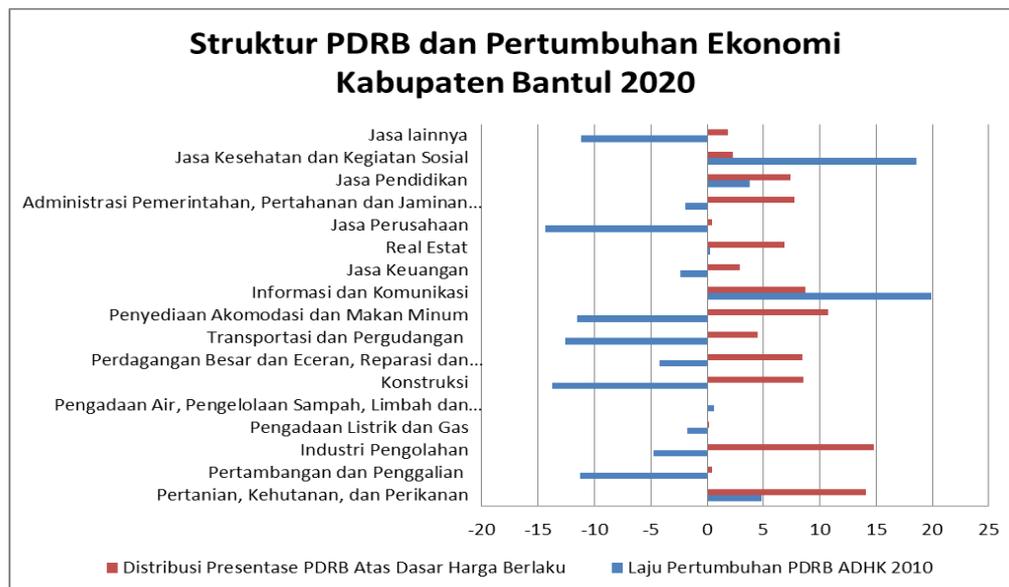
Gambar 2 24 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul disandingkan dengan DIY Tahun 2016-2020

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan, meskipun besar peningkatannya kurang signifikan. Pertumbuhan

tertinggi dicapai tahun 2019, yaitu sebesar 5,53 persen. Tahun 2016-2019 relatif stabil pada rentang 5,05% - 5,53%. Tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,66. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul lebih tinggi dibandingkan DIY pada tahun 2016 dan 2020. Sedangkan pada tahun 2017-2019 lebih rendah dibandingkan DIY.

Tren dari data berbentuk kuadratik dengan puncak, perlu usaha yang besar agar tahun-tahun berikutnya besar pertumbuhan ekonominya tidak mengikuti tren seperti di atas. Besaran pertumbuhan ekonomi harus diupayakan menjadi positif kembali agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan

Apabila dilihat dari struktur PDRB maka besarnya pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



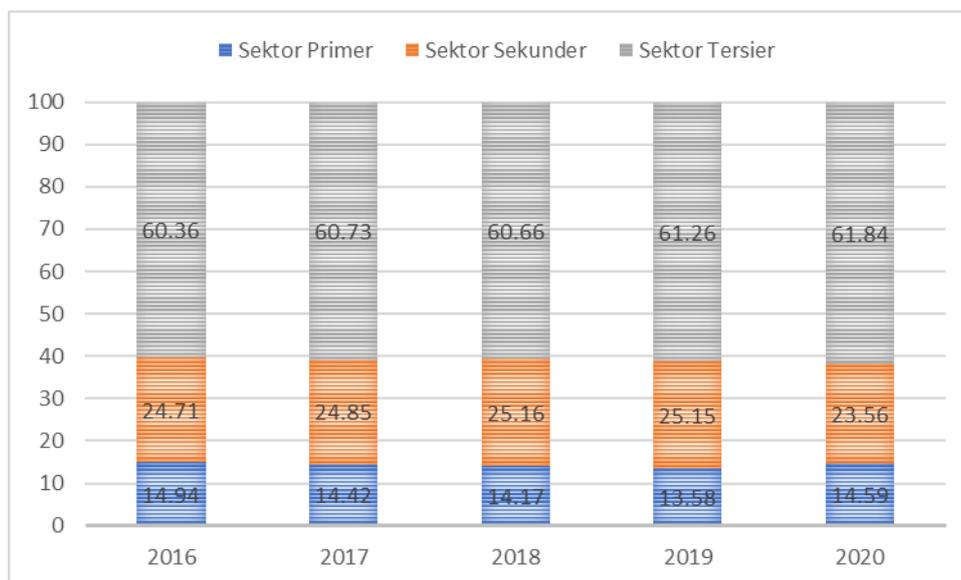
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 25 Struktur PDRB 2020 dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa lapangan usaha informasi dan komunikasi dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial pertumbuhannya lebih menonjol dibandingkan kategori usaha yang lain. Pertanian mempunyai pertumbuhan yang juga positif

meskipun lebih rendah dibanding kedua sektor tersebut di atas. Kontribusi terbesar masih disumbang oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman.

Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku apabila dikelompokkan dalam sektor tersier, sekunder dan primer, dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 26 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlangsung menurut Kelompok Sektor (persen), 2016-2020

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir, tahun 2016-2019 pangsa sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan dan pertambangan dan penggalian) cenderung menurun, baru tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,01 persen. Sebaliknya sektor sekunder (industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan konstruksi) cenderung meningkat di tahun 2016 sampai tahun 2019, tetapi mengalami penurunan di tahun 2020. Berbeda dengan kedua sektor di atas, sektor tersier (kategori lainnya) konsisten rata-rata mengalami kenaikan, kecuali tahun 2018 sedikit sekali mengalami

penurunan. Sektor tersier ini memberikan kontribusi lebih dari 60 persen dari total PDRB Kabupaten Bantul.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul menurut lapangan usaha, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 13 Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori

No	Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,52	2,5	2	0,13	4,86
2	Pertambangan dan Penggalian	0,35	0,06	1,57	-0,27	-11,32
3	Industri Pengolahan	5,43	6,39	5,52	5,38	-4,8
4	Pengadaan Listrik, Gas	15,58	3,99	4,85	4,73	-1,77
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2,96	3,18	5,16	8,25	0,61
6	Konstruksi	4,07	5,93	7,24	5,17	-13,78
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	6,54	5,79	5,64	5,19	-4,2
8	Transportasi dan Pergudangan	4,23	3,88	5,51	6,46	-12,58
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,19	5,7	6,75	8,68	-11,55
10	Informasi dan Komunikasi	8,41	5,87	6,18	7,29	19,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,65	2,82	6,59	9,97	-2,41
12	Real Estate	5,82	4,97	5,41	6,43	0,23
13	Jasa Perusahaan	4,26	4,27	5,37	7,38	-14,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,84	4,98	4,55	3,42	-1,96
15	Jasa Pendidikan	2,95	5,16	6,08	6,65	3,79
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,2	5,13	4,62	7,02	18,59
17	Jasa Lainnya	6,02	5,61	7,14	6,09	-11,21
	PDRB	5,05	5,1	5,47	5,53	-1,66

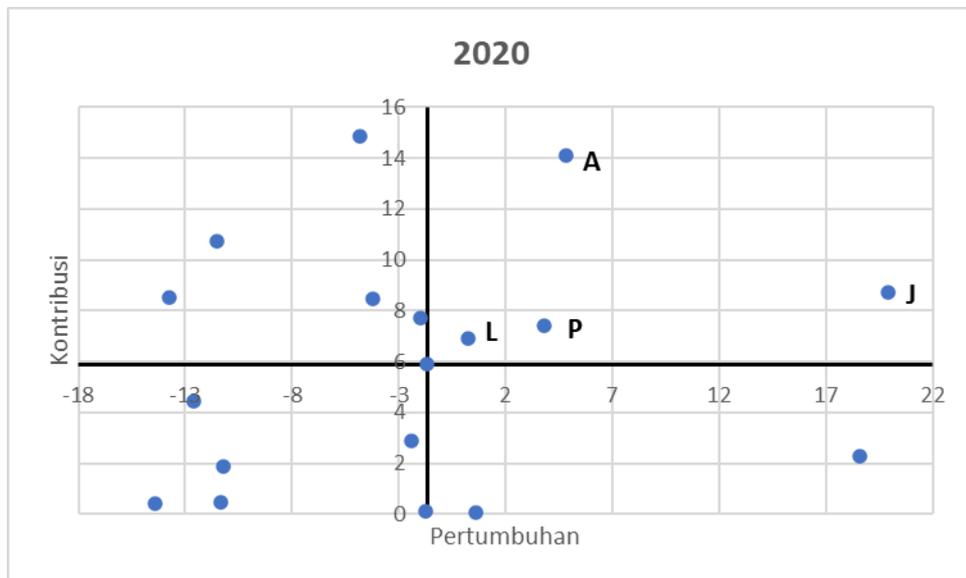
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul tahun 2018 dan 2019 melaju relatif lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi masih sebesar 5,1 persen, sementara tahun 2018 tumbuh menjadi 5,47 persen dan tahun 2019 tumbuh sebesar 5,53 persen.

Pada tahun 2020 terjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana pada kondisi pandemi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul mengalami kontraksi. Hanya ada beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di antaranya adalah sektor informasi dan komunikasi (tumbuh sebesar 19,94%), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (tumbuh sebesar 18,59%) dan sektor

pertanian yang tumbuh sebesar 4,86%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi signifikan di antaranya adalah sektor jasa perusahaan (-14,4%), sektor konstruksi (-13,78%), sektor transportasi dan pergudangan (-12,58%), sektor akomodasi dan makan minum (-11,55%), sektor pertambangan dan penggalian (-11,32%) dan sektor jasa lainnya (-11,21%).

Lapangan usaha yang mempunyai kontribusi dan pertumbuhan di atas rata-rata Kabupaten Bantul dalam pemetaan pertumbuhan dan kontribusi lapangan usaha dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Keterangan

A: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,

J: Informasi dan Komunikasi

P: Jasa Pendidikan

L: Informasi dan Komunikasi.

Gambar 2 27 Pemetaan Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2020

Dari pemetaan pertumbuhan dan kontribusi lapangan usaha dapat ditunjukkan perubahan posisi sektor-sektor di Kabupaten Bantul tahun 2016, 2018 dan 2020, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2 14 Lapangan Usaha yang Mempunyai Pertumbuhan dan Kontribusi di atas Rata-rata

Tahun	2016	2018	2020
Lapangan usaha yang mempunyai kontribusi dan pertumbuhan di atas rata-rata Kabupaten Bantul	<ul style="list-style-type: none"> • Industri pengolahan • Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor • Penyediaan akomodasi makanan dan minuman • Informasi dan Komunikasi • Real Estate • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri pengolahan • Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. • Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor • Penyediaan akomodasi makanan dan minuman • Informasi dan Komunikasi • Jasa Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, Kehutanan dan Perikanan • Informasi dan Komunikasi • Real Estate • Jasa Pendidikan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 dan 2018 ada beberapa lapangan usaha yang konsisten tumbuh dan berkontribusi di atas angka rata-rata Kabupaten Bantul. Lapangan usaha tersebut adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi makanan dan minuman dan informasi dan komunikasi.

Tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 hanya sektor informasi dan komunikasi yang tetap tumbuh dan berkontribusi di atas rata-rata, sementara sektor lain yang juga tumbuh di atas rata-rata adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, real estate dan jasa pendidikan. Hal ini menunjukkan kondisi pandemi telah mengubah komposisi sektor ekonomi.

2.2.2. PDRB Perkapita

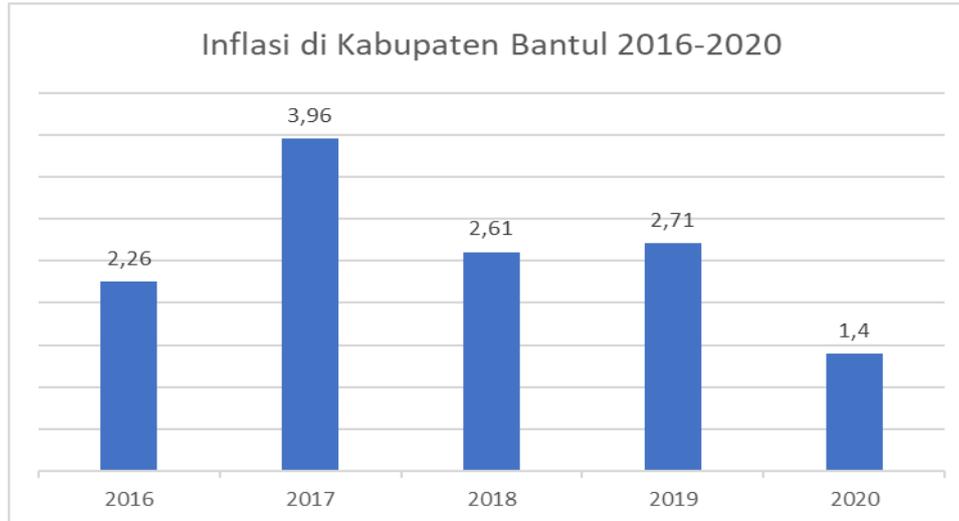
Perkembangan nilai PDRB per kapita dapat dipakai untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum. PDRB per kapita secara teoritis merupakan ketersediaan barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh setiap masyarakat di daerah tersebut. Semakin besar nilai PDRB per kapita, semakin banyak pula ketersediaan barang dan jasa yang dapat mereka nikmati. Dengan demikian semakin besar PDRB per kapita, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Nilai PDRB per kapita diukur menggunakan harga berlaku tahun 2020, yaitu sebesar 25,4 juta rupiah. Dengan perhitungan menggunakan harga konstan tahun 2010 tercatat bahwa nilai PDRB per kapita sebesar 18,29 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan, pada tahun 2019 mencapai 4,32%, yang merupakan pencapaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan dan tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup besar yaitu sebesar -2,76 atau turun sebesar 5,08 persen dari tahun 2019. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan drastis di tahun 2020.

2.2.3. Laju Inflasi

Kenaikan harga yang wajar sesuai perkembangan permintaan dapat mendorong peningkatan produktivitas sektoral yang akhirnya dapat mendorong peningkatan penyerapan angkatan kerja. Namun kenaikan harga yang tidak terkendali dan terus menerus akan menimbulkan dampak negatif pada perekonomian.

Untuk tahun kalender 2020, inflasi IHK tahun 2020 merupakan tingkat perubahan IHK secara umum pada posisi bulan Desember tahun sebelumnya. Kondisi inflasi yang terjadi selama lima tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:



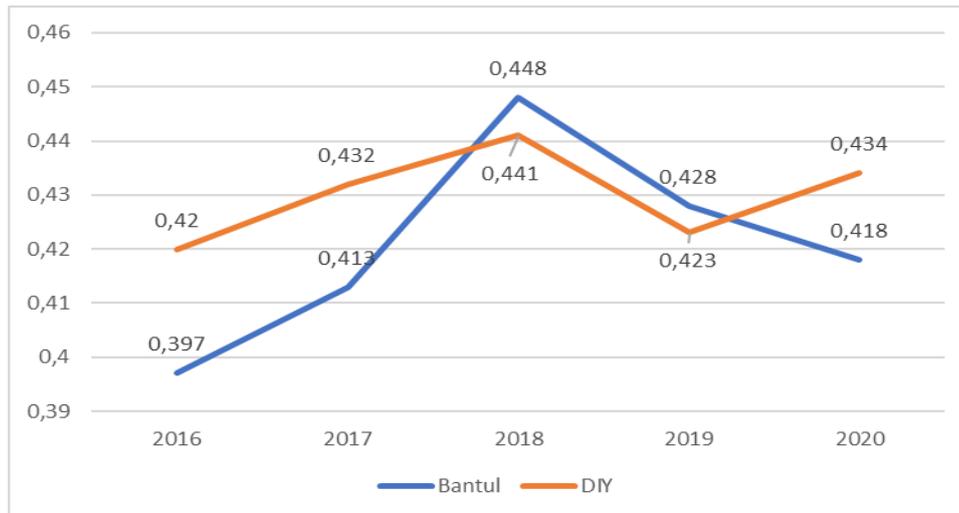
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 28 Inflasi di Kabupaten Bantul 2016-2020

Besaran inflasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan tren kuadratik yang mencapai posisi tertinggi di tahun 2017 dan mengalami penurunan di tahun 2018, selanjutnya selama tahun 2018 sampai dengan 2020 bersifat fluktuatif, dalam arti mengalami peningkatan di tahun 2019 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2020.

2.2.4. Indeks Gini

Distribusi pendapatan dapat diukur dengan Indeks Gini. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Menurut Harry T. Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 29 Perkembangan Gini Rasio di Kabupaten Bantul dan DIY 2016-2020

Nilai Koefisien Gini Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai dengan 2020 berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,5, sehingga dapat dikatakan berada dalam kategori ketimpangan “moderat”. Indeks Gini Kabupaten Bantul pada tahun 2016, 2017 dan 2020 lebih baik dibandingkan DIY. Sedangkan tahun 2018 dan 2019 lebih tinggi dibandingkan provinsi.

Informasi peningkatan koefisien Gini di Kabupaten Bantul perlu mendapat perhatian. Karena pertumbuhan di Kabupaten Bantul masih belum diikuti dengan adanya perbaikan pada aspek pemerataan hasil pembangunan.

2.2.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan bukan hanya masalah jumlah jiwa atau proporsi penduduk miskin (P0) tetapi juga menyangkut kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur sejauh mana perbedaan antara rerata

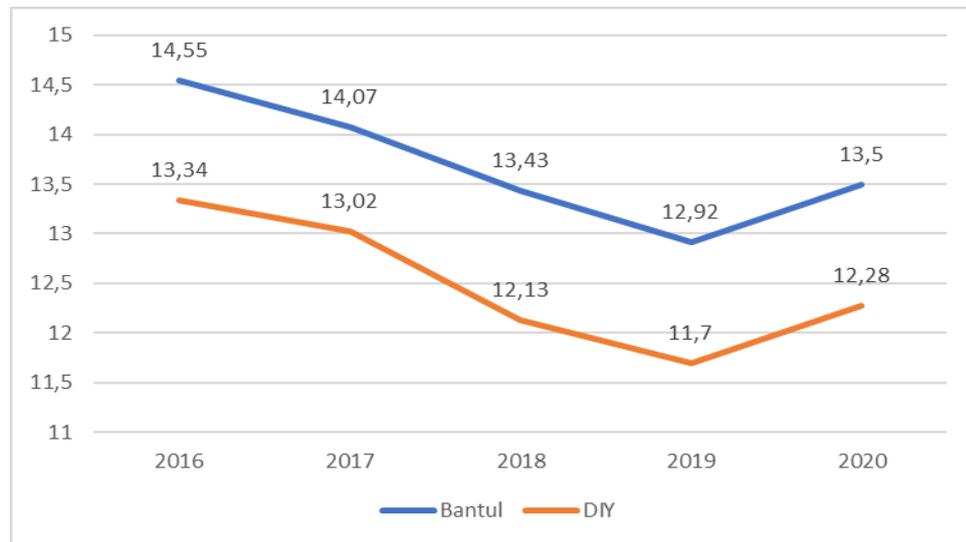
pengeluaran miskin dari garis kemiskinannya. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rerata pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinannya. Indeks Keparahan Kemiskinan (*P2*) mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2 15 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)
2016	14,55	142.760	2,02	0,41	332.057
2017	14,07	139.670	2,21	0,56	347.476
2018	13,43	134.835	2,17	0,46	369.480
2019	12,92	131.151	1,87	0,43	381.538
2020	13,50	138.660	1,85	0,43	405.613

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Tingkat kemiskinan pada periode 2016 sampai dengan 2019 mengalami penurunan, tetapi tahun 2020 pada masa pandemi angka kemiskinan ini meningkat kembali. Perbandingan tingkat kemiskinan kabupaten Bantul dengan DIY disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 30 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul dan DIY 2016-2020

Persentase penduduk miskin tahun 2020 sebesar 13,5% naik 0,58% dari tahun 2019. Jumlah penduduk miskin bertambah kurang lebih 6 ribu jiwa pada 2020. Selama periode 2016-2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul selalu lebih tinggi dibandingkan DIY.

Data kemiskinan yang bersumber dari BPS di atas digunakan sebagai indikator makro daerah, sehingga tidak dapat menampilkan data *by name by addres* yang dibutuhkan dalam upaya penurunan jumlah penduduk miskin.

Dalam rangka menentukan sasaran penerima manfaat dari program penanggulangan kemiskinan Kementerian Sosial mengeluarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tabel berikut menunjukkan data jumlah penduduk miskin di setiap kapanewon menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tabel 2 16 Persentase Data Individu Desil 1-4 dengan Jumlah Penduduk Per Kapanewon

No.	Kapanewon	Penduduk tahun 2020	Jumlah	%
1	Bambanglipuro	41.706	12.637	30,30
2	Banguntapan	113.298	15.551	13,73
3	Bantul	64.652	12.341	19,09
4	Dlingo	39.998	14.518	36,30
5	Imogiri	63.835	21.458	33,61
6	Jetis	58.631	15.383	26,24
7	Kasihlan	104.599	18.639	17,82
8	Kretek	30..764	7.131	23,18
9	Pajangan	36.551	15.793	43,21
10	Pandak	52.036	19.824	38,10
11	Piyungan	52.862	13.603	25,73
12	Pleret	48.497	14.916	30,76
13	Pundong	35.666	12.822	35,95
14	Sanden	31..810	9.369	29,45
15	Sedayu	48.156	13.456	27,94
16	Sewon	100.563	18.968	18,86
17	Srandakan	31.082	10.562	33,98
Total		954.706	246.971	25,87

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) No. 146 tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan kapanewon dengan persentase individu desil 1-4 terbanyak adalah Kapanewon Pajangan, Pandak, Dlingo, Pundong, Imogiri, dan Srandakan, sementara data jumlah penduduk miskin yang sebesar 246.971 berbeda dengan data dari BPS yang sebesar 138.660 karena data penduduk miskin pada DTKS mencakup penduduk miskin dan penduduk rawan miskin.

2.2.6. Angka Pengangguran Terbuka

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Pengangguran di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan meskipun dengan laju yang lambat. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT), TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Tabel 2 17 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	TPT	TPT DIY
1	2016	3,00	2,72
2	2017	2,87	3,02
3	2018	2,72	3,37
4	2019	3,06	3,18
5	2020	4,06	4,57

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2021

Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka naik dari 3,06% di tahun 2019 menjadi 4,06% di tahun 2020. Setiap tahun TPT Kabupaten Bantul dibandingkan DIY lebih rendah, kecuali tahun 2016. Jumlah pengangguran di Bantul pada tahun 2017 sebanyak 17.466 orang, sempat menurun menjadi 15.730 jiwa pada 2018 kemudian meningkat kembali menjadi 17.700 orang pada

tahun 2019. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai IPM Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bantul terus meningkat.

Tabel 2 18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kulonprogo	72,38	73,23	73,76	74,44	74,46
Bantul	78,42	78,67	79,45	80,01	80,01
Gunungkidul	67,82	68,73	69,24	69,96	69,98
Sleman	82,15	82,85	83,42	83,85	83,84
Yogyakarta	85,32	85,49	86,11	86,65	86,61
D.I Yogyakarta	78,38	78,89	79,53	79,99	79,97

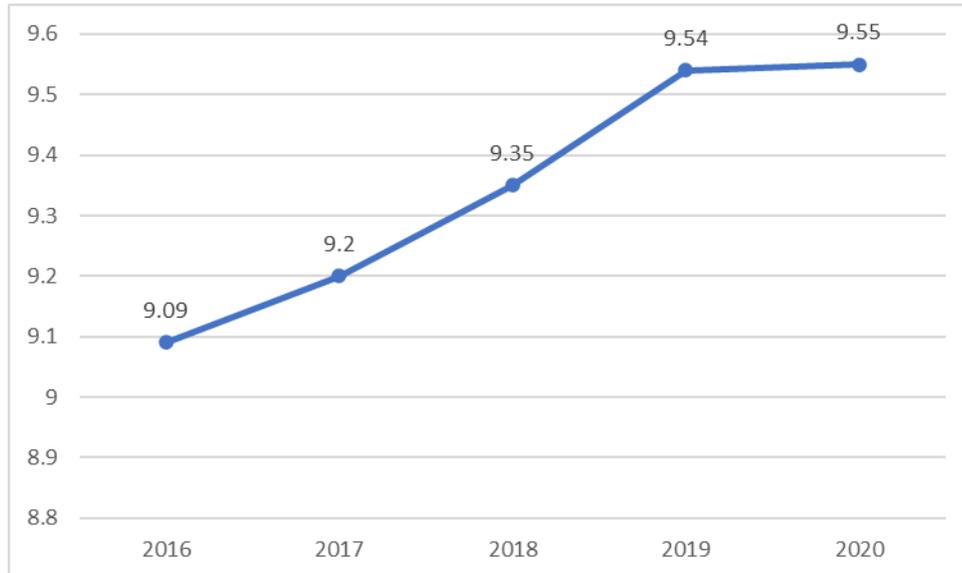
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

IPM Kabupaten Bantul pada tahun 2019 berubah status dari IPM tinggi menjadi sangat tinggi, levelnya mencapai 80,01. Capaian level IPM Kabupaten Bantul termasuk dalam kelompok 36 besar daerah dengan IPM tertinggi di Indonesia. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 78,42. Komponen IPM Kabupaten Bantul adalah indikator usia harapan hidup (UHH) 73,86 tahun, angka harapan lama sekolah (HLS) 15,17 tahun, rata-rata lama sekolah (RLS) 9,55 tahun, dan pengeluaran perkapita riil (KAP) Rp15,52 juta yang disesuaikan.

Peningkatan ini sangat dipengaruhi oleh posisi beberapa kapanewon di Bantul yang menjadi wilayah penyangga perkembangan Kota Yogyakarta. Beberapa perguruan tinggi juga melakukan pengembangan infrastruktur pendidikan di wilayah Bantul, karena daya tampung wilayah Kota Yogyakarta yang sudah tidak memungkinkan.

2.2.8. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

*Angka Sementara

Gambar 2 31 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

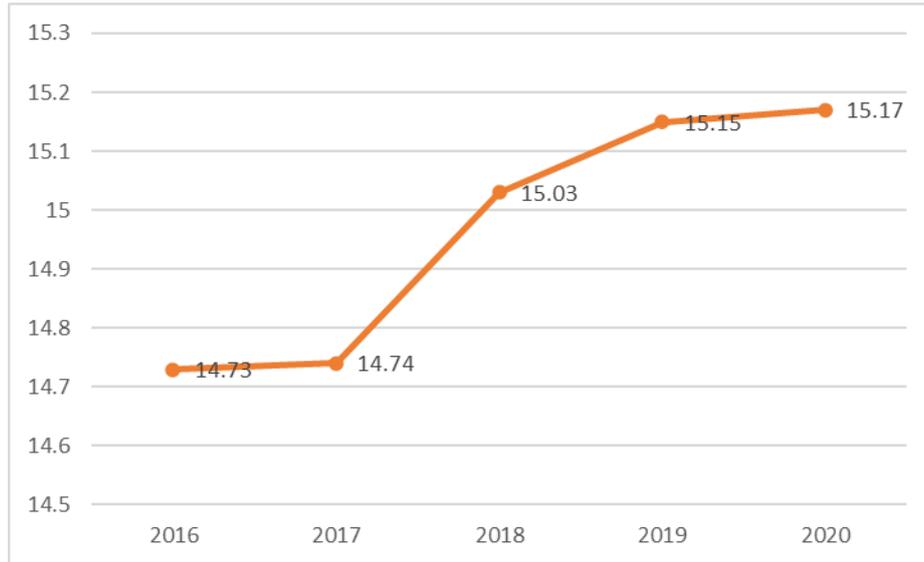
Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan, dari 9,09 tahun pada tahun 2016 menjadi 9,55 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat, meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bantul bersekolah hanya setingkat SLTP.

2.2.9. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang

pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

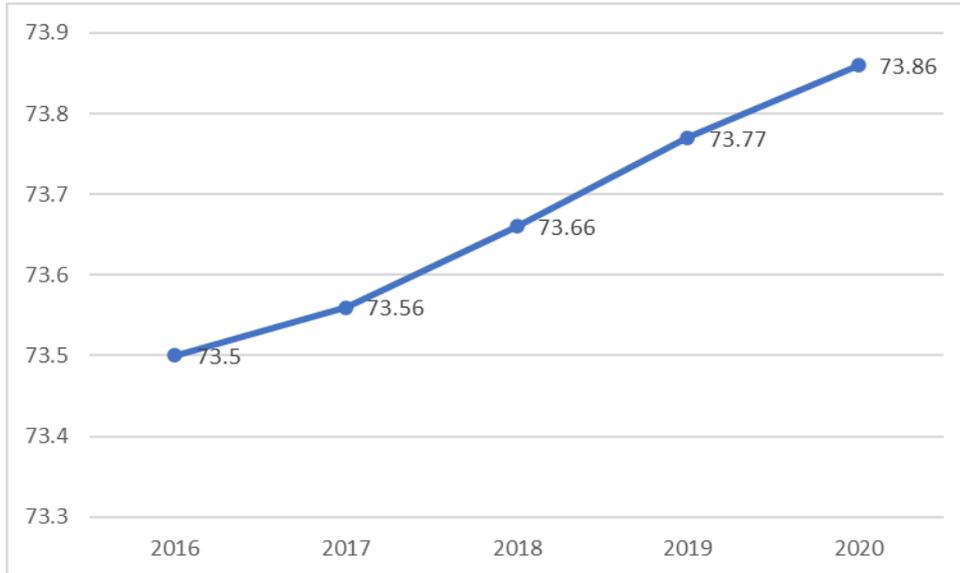
*Angka Sementara

Gambar 2 32 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Gambar di atas menunjukkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul pada tahun 2020 sebesar 15,17 tahun. Capaian tersebut dapat diartikan bahwa lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 15,17 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi jenjang Diploma III.

2.2.10. Umur Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul dapat dinilai dari Umur Harapan Hidup (UHH) yang menjadi salah satu IKU Bupati. Umur Harapan Hidup Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.



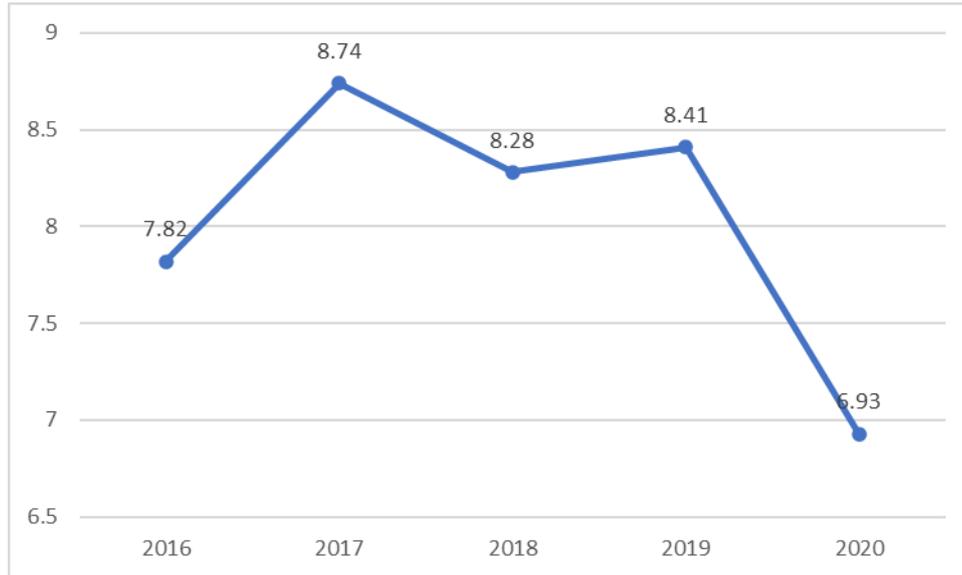
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 33 Umur (Angka) Harapan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Gambar di atas menunjukkan UHH Kabupaten Bantul pada tahun 2020 yaitu 73,86 tahun, 2019 yaitu 73,77 tahun meningkat dari tahun 2018 sebesar 73,66 tahun. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor antara lain Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Balita Gizi Buruk, Prevalensi HIV /AIDS, dan Angka Kesakitan (*Incidence Rate/ IR*) DBD serta penyakit tidak menular (PTM).

2.2.11. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 34 Perubahan Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Dari gambar di atas dapat dilihat perubahan angka kematian bayi dari tahun 2016 – 2020 cenderung menurun. Pada tahun 2020 cenderung menurun cukup signifikan dibanding tahun 2019. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2020 sebesar 6,93 terjadi penurunan dibanding tahun 2019 sebesar 8,41 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi pada tahun 2020 terbanyak disebabkan kelainan bawaan. Data penyebab kematian bayi di Kabupaten Bantul disajikan pada berikut:

Tabel 2 19 Penyebab Kematian Bayi

No	Sebab Kematian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bayi Berat Lahir Rendah	22	22	31	28	16
2	Asfiksia	24	14	32	27	16
3	Kelainan bawaan	23	20	19	20	26
4	Lain2 (Aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya)	25	52	25	35	17
J u m l a h		94	108	107	109	75

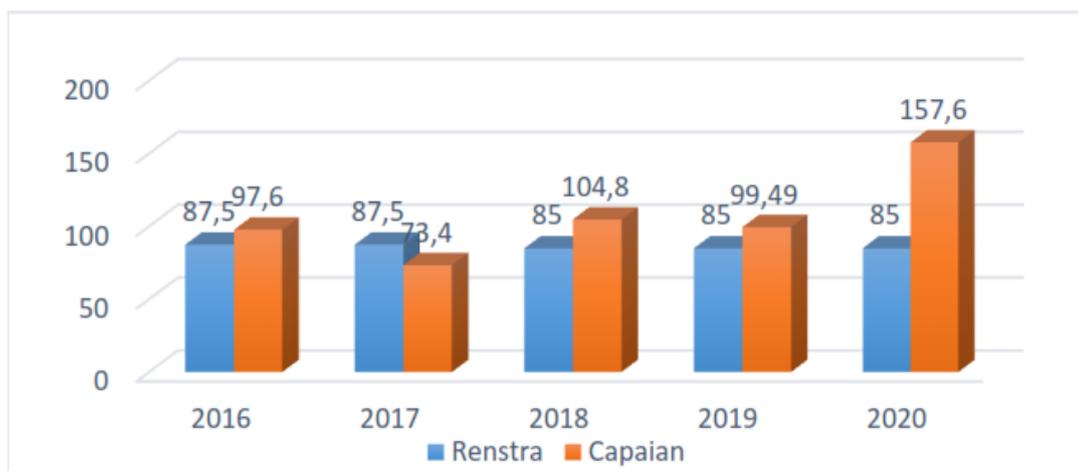
Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK), dan keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada

bayi dan program perbaikan gizi masyarakat serta dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

2.2.12. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dari jumlah kematian ibu maternal (hamil, melahirkan, dan nifas), bukan disebabkan oleh kecelakaan ataupun penyakit lainnya. Kecenderungan AKI pada lima tahun terakhir disajikan pada grafik berikut :



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 35 Kondisi Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Capaian angka kematian ibu pada tahun 2020 sebesar 157,6 per 100.000 kelahiran hidup (20 kasus kematian ibu). Bila dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi kenaikan. Pada tahun 2019 AKI di Kabupaten Bantul sebanyak 13 kasus kematian ibu atau 99,49 per 100.000 kelahiran hidup.

Penyebab kematian ibu antara lain adanya perdarahan dan Pre Eklampsia, serta penyebab lain-lain yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 20 Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Penyebab Kematian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perdarahan	2	2	5	3	1
2	PER/PEB/Eklampsi	4	2	2	4	5
3	Emboli air ketuban	0	0	0	1	0
4	Infeksi	2	2	0	-	3
5	Lain2/Penyakit penyerta	2	2	7	2	0

No	Penyebab Kematian	2016	2017	2018	2019	2020
6	Penyakit Jantung	0	0	0	2	5
7	Psikosis post partum dengan acute coronary syndrome	2	1	0	-	0
8	Ileus paralitik	0	0	0	1	0
9	Kanker	0	0	0	0	2
10	Syok Septik/Hypovolemik	0	0	0	0	2
11	Covid-19	0	0	0	0	2
J u m l a h		12	9	14	13	20

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Upaya mempercepat penurunan kematian ibu memerlukan keterpaduan lintas program, yaitu: 1) program perbaikan gizi masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK); 2) program pencegahan penyakit; 3) program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam Kalurahan Siaga, ambulan kalurahan, dan donor darah; 4) partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil risiko tinggi dan pengenalan deteksi dini risiko ibu hamil risiko tinggi; 5) peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia juga melalui Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) diintegrasikan dengan kelas ibu; 6) membentuk jejaring Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA); dan 7) peningkatan Puskesmas mampu Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED); serta 8) pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal).

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar merupakan penyelenggaraan pelayanan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan berhak diperoleh setiap warga negara secara optimal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pemenuhan SPM meliputi 6 (enam) bidang, yaitu: Bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.

2.3.1.1. Pendidikan

Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan kewenangan Kabupaten Bantul meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Sembilan tahun, dan Pendidikan Kesetaraan

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA, sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi Kelompok Bermain (KB), TPA, dan satuan PAUD sejenis.

Tabel 2 21 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Peserta Didik	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
1.	TK/RA	7	553	25.793	2.886	1.674	58%
2.	KB	0	492	8263	1605	0	0
3.	TPA	0	56	811	214	0	0
4.	SPS	0	237	3.604	778	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Indikator untuk mengukur tingkat Pendidikan PAUD antara lain adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan proporsi anak yang terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini terhadap penduduk pada kelompok usia

tertentu, dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 usia PAUD adalah 4-6 tahun. Sedangkan APM menunjukkan Proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang terdaftar dalam PAUD terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM juga menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia PAUD.

Tingkat Pendidikan PAUD di Kabupaten Bantul dari tahun 2016-2020 ditunjukkan oleh nilai APK dan APM sebagai berikut:

Tabel 2 22 Perkembangan APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Kasar					
	APK PAUD	93,44	98,20	100,70	106,24	97,70
2.	Angka Partisipasi Murni					
	APM PAUD	83,73	88,68	86,54	83,84	81,20

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Nilai APK yang semakin tinggi dari 2016-2019 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk secara umum semakin meningkat, hal ini berarti kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan yang dimulai pada usia dini semakin meningkat pula, sebagaimana diketahui bahwa usia PAUD merupakan masa emas perkembangan otak dan kecerdasan anak. Namun turunnya nilai APK pada tahun 2020 merupakan dampak pandemi Covid 19 dimana terjadi perubahan pola pembelajaran yang menuntut penggunaan teknologi informasi/internet yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh siswa PAUD secara optimal.

Nilai APM yang menunjukkan tren menurun, mengindikasikan bahwa daya serap sistem pendidikan yang ada masih belum mencukupi, fasilitas pendidikan jenjang PAUD yang tersedia belum dapat dimanfaatkan penduduk sesuai usia PAUD dalam arti bahwa penduduk usia PAUD belum semua dapat bersekolah tepat waktu.

Dalam perkembangannya sesuai Peraturan Presiden No.60 tahun 2013 tentang Anak Usia Dini Holistik Integratif,

penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara Holistik Integratif pula.

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

Layanan PAUD HI merupakan layanan yang kompleks dan menyeluruh, sehingga dibutuhkan sinergi dari lintas sektor, antara lain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD), Polres, Kapanewon, Kalurahan, Organisasi Mitra PAUD, Posyandu, Tokoh masyarakat dan Paguyuban Orangtua serta Komite Sekolah.

Pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten Bantul telah mencapai 90% dengan kategori sangat baik. Pada tahun 2020 PAUD HI tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya pandemi Covid 19, namun dari hasil pemantauan perkembangan anak oleh pendidik/guru, layanan PAUD HI tetap dilaksanakan meski sangat terbatas.

b. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun merupakan program pemerintah yang menjamin penduduk usia 7-15 tahun untuk mengenyam pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

Keberhasilan program wajib belajar Sembilan tahun ditentukan oleh banyak faktor diantaranya kualitas tenaga pendidik, lembaga pendidikan dan partisipasi peserta didik.

Kondisi pendidikan dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 23 Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Siswa	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
1	SD	281	83	73.523	5.033	2552	50,71
2	MI	3	30	6.584	492	215	43,7
3	SMP	47	46	31.618	2.268	1.461	64,42
4	MTs	9	16	8.273	735	368	50,07

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Nilai akreditasi yang diperoleh lembaga pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 24 Jumlah Sekolah Menurut Peringkat Akreditasi yang Diperoleh di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Nama Lembaga	Peringkat Akreditasi				Jumlah
		A	B	C	BT	
1	SD	306	56	0	2	364
2	MI	24	8	0	1	33
3	SMP	64	22	3	4	93
4	MTs	18	6	0	1	25

Sumber: Badan Akreditasi Nasional Kemendikbud, 2021

Partisipasi peserta didik jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SLTP/MTs ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2 25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Kasar					
	APK SD/MI	96,12	98,20	98,45	95,26	101,78
	APK SMP/MTs	95,00	99,23	97,83	101,38	102,86
2.	Angka Partisipasi Murni					
	APM SD/MI	84,10	88,68	89,55	85,86	92,96
	APM SMP/MTs	71,09	76,60	77,33	76,8	79,01
3	Angka Partisipasi Sekolah					
	APS SD/MI			100	100	99,80
	APS SMP/Mts			100	99,74	99,36

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di usia yang sama. APM

menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

Untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun, dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Realisasi APK SD/MI tahun 2020 sebesar 101,78%, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 6,84 % dari capaian tahun 2019 sebesar 95,26. Sedangkan realisasi APK SMP/MTs tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,48% menjadi 102,86%.

Realisasi APM SD/MI pada tahun 2020 adalah 92,96%, dan APM SMP/MTs tahun 2020 adalah 79,01%. Capaian APM seperti di atas bukan berarti bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun banyak yang tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok umur tersebut bersekolah di luar Kabupaten Bantul dan atau sudah masuk di jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Angka Putus Sekolah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keterjangkauan dan pemerataan pendidikan dengan melihat proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan pendidikan. Semakin kecil angka putus sekolah berarti semakin baik pendidikan di wilayah tersebut

Tabel 2 26 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Putus Sekolah					
	SD/MI	0,02	0,02	0,01	0,004	0,004
	SMP/MTs	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Angka Putus Sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Bantul menunjukkan tren yang semakin turun dan pada jenjang SMP/MTs sudah mencapai angka 0 berarti tidak ada lagi siswa yang putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kabupaten Bantul sudah semakin baik, namun masih belum merata.

Beberapa strategi dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan indikator di atas diantaranya adalah :

- (1) Program Wajar 9 tahun dilakukan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya adalah dengan pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan PTK, pengembangan sarpras sekolah, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan implementasi sistem penilaian;
- (2) Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas serta Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi tentang pendidikan.

c. Pendidikan Kesetaraan dan Non-Formal

Penyelenggaraan pendidikan non formal diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melengkapi pendidikan formal.

Tabel 2 27 Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Nama Lembaga dan Keterangan	Jumlah Perkembangan Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SKB					
	- Jumlah Lembaga	1	1	1	1	1
	- Jumlah Warga Belajar	143	296	170	317	386
	- Jumlah Tutor	9	36	36	36	31
2	PKBM					
	- Jumlah Lembaga	33	27	31	31	26
	- Jumlah Warga Belajar	1762	1768	2570	3115	2771
	- Jumlah Tutor	210	423	135	226	404
3	LKP					
	- Jumlah Lembaga	62	44	44	34	42
	- Jumlah Warga Belajar	3276	3452	2272	2296	2059
	- Jumlah Tutor	210	423	518	315	264
4	TBM					
	- Jumlah Lembaga	35	47	53	62	-
	- Jumlah Warga Belajar					
	- Jumlah Tutor					
5	Rumah Pintar					
	- Jumlah Lembaga	2	2	2	-	-
	- Jumlah Warga Belajar					
	- Jumlah Tutor					
6	Homeschooling					
	- Jumlah Lembaga	2	2	2	-	-
	- Jumlah Warga Belajar	21	21	25	-	-
	- Jumlah Tutor	10	10	10	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Keterangan :

- SKB : Sanggar Kegiatan Belajar
- PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- LKP : Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- TBM : Taman Bacaan Masyarakat;
- Rumpin : Rumah Pintar;

Dari tabel tersebut diketahui pada tahun 2019-2020 jumlah data rumah pintar dan *homeschooling* nol karena lembaga tersebut tidak mengajukan ijin.

Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang belum mampu menamatkan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) dilakukan melalui program pendidikan kesetaraan yaitu Kelompok Belajar (Kejar) paket. Kejar paket A setara dengan SD, Kejar paket B setara dengan SMP, dan Kejar paket C setara dengan SMA.

Tabel 2 28 Jumlah Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Nama Program	Jumlah Warga Belajar		Jumlah
		L	P	
1	Paket A	563	469	1,032
2	Paket B	466	203	669
3	Paket C	998	458	1.456

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Pendidikan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 29 Indikator Kinerja Utama Pendidikan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APK PAUD	98,7	98,75	108,41	106,24	97,70
2.	Angka Partisipasi Kasar					
	APK SD/MI	96,12	98,20	98,45	95,26	92,77
	APK SMP/MTs	95,00	99,23	97,83	101,38	97,23
3.	Angka Partisipasi Murni					
	APM SD/MI	84,10	88,68	89,55	85,86	86,55
	APM SMP/MTs	71,09	76,60	77,33	76,8	76,31
4	Rata-Rata Lama Sekolah	8,79	8,84	9,2	9,35	9,55
5	Peringkat Rata-rata Nilai USM					
	- Nilai USM SD / MI	-	4	4	3	0
	- Nilai USM SMP / MTs	-	3	3	3	0
6	Jumlah Prestasi Non Akademik TK Nasional (Buah)		6	8	4	4

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
7	Persentase Kelulusan					
	- SD / MI	100	100	100	100	100
	- SMP / MTs	100	100	100	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM)					
	- Dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	109,61	108,56	101,27
	- Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100	100	108,54	111,18	105,93
9	Angka Putus Sekolah					
	- SD/MI	0,02	0,02	0,01	0,004	0,004
	- SMP/MTs	0,02	0,02	0,02	0,01	0

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa di tahun 2020 nilai APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTs, angka capaiannya mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu yang sekolah di jenjang atasnya. Selain itu, terdapat siswa yang bersekolah di luar wilayah Bantul.

2.3.1.2. Kesehatan

a. Pelayanan Kesehatan

1) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk memberikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, maka strategi operasional peningkatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Idealnya satu Posyandu melayani 50 Balita.

Tabel 2 30 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah posyandu	1.137	1.141	1.141	1.139	1.139
2	Jumlah balita	59.720	58.255	60.087	59.522	59.947
3	Rasio posyandu per 1000 balita	19,04	19,59	18,99	19,2	20,3
4	Cakupan layanan posyandu	52 (balita)	51 (balita)	53 (balita)	52 (balita)	49 (balita)

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 rasio Posyandu per 1.000 Balita sebesar 20,3 berarti dalam 1.000 Balita terdapat 20 Posyandu. Hal ini dapat diartikan bahwa satu Posyandu melayani 49 Balita.

2) Ketersediaan Fasilitas

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan swasta. Secara umum fasilitas kesehatan semakin meningkat, dengan demikian diharapkan lebih banyak kemudahan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Tabel 2 31 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	2016 (unit)	2017 (unit)	2018 (unit)	2019 (unit)	2020 (unit)
1	Rumah Sakit Umum	10	11	10	11	10
2	Rumah Sakit Bersalin	0	0	0	0	0
3	Rumah Sakit Khusus (bedah, paru, KIA)	5	5	6	6	6
4	Klinik Utama	2	3	2	2	2
5	Klinik Pratama	47	55	56	61	70
	Klinik Pratama Rawat Jalan	38	45	45	50	59
	Klinik Pratama Rawat Inap	9	10	11	11	11
6	Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	4	5	0	0	0
7	Apotek	123	125	140	157	175
8	Klinik kecantikan estetika	10	9	9	8	8
9	Laboratorium	4	3	3	3	3
10	Toko obat	4	5	7	8	10
11	Optik	12	12	13	7	7
12	Puskesmas rawat inap	16	16	16	16	16
13	Puskesmas non rawat inap	11	11	11	11	11
14	Puskesmas pembantu	65	65	65	65	65
15	Puskesmas keliling	27	27	27	27	27
16	Posyandu	1132	1132	1142	1142	1139
17	Posyandu lansia	901	967	1034	1034	1034

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit RS sebagaimana diatur dalam Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 534/KPTS/M/2001. Penduduk Kabupaten Bantul tahun 2020 sebanyak 954.706 jiwa, berarti minimal harus ada 4 unit RS. Sampai tahun 2020 terdapat RS sejumlah 10 unit, hal ini menunjukkan ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bantul telah mencukupi.

Seluruh puskesmas di Kabupaten Bantul sudah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) penuh sejak tanggal 2 Januari 2016. Pelaksanaan BLUD Puskesmas ini dilaksanakan di 27 Puskesmas yang terdiri dari 16 Puskesmas rawat inap, dan 11 Puskesmas rawat jalan. Adapun hasil penilaian akreditasi Puskesmas sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 27 Puskesmas telah terakreditasi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan NomornHK.02.01/MENKES/455/2020 tentang perizinan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19, pada Tahun 2020 tidak dilaksanakan akreditasi puskesmas.

Tabel 2 32 Penilaian Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Bantul

No.	Puskesmas	2016	2017	2018	2019	2020	Status
1	Pajangan	√			√	tidak dilaksanakan akreditasi	Utama
2	Pleret	√			√		Utama
3	Piyungan	√			√		Paripurna
4	Banguntapan II	√			√		Utama
5	Srandakan	√		√			Utama
6	Sanden	√			√		Madya
7	Pundong	√			√		Madya
8	Bantul I	√			√		Utama
9	Imogiri I	√		√			Utama
10	Bambanglipuro			√			Utama
11	Jetis I	√		√			Utama
12	Jetis II			√			Paripurna
13	Kasihani I		√		√		Utama
14	Pandak I		√		√		Utama

No.	Puskesmas	2016	2017	2018	2019	2020	Status
15	Pandak II		√		√		Utama
16	Kretek		√				Utama
17	Bantul II		√				Utama
18	Imogiri II		√				Madya
19	Dlingo I		√				Madya
20	Dlingo II		√				Utama
21	Sewon I		√				Madya
22	Sewon II		√				Utama
23	Sedayu I		√				Madya
24	Sedayu II		√				Madya
25	Banguntapan I		√				Utama
26	Banguntapan III		√				Madya
27	Kasihani II		√				Madya

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dilakukan melalui penetapan kelas dan akreditasi rumah sakit milik pemerintah dan swasta. Penetapan kelas dan status akreditasi rumah sakit disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 33 Kelas Rumah Sakit Tahun 2020

No.	Rumah Sakit	Kelas	Akreditasi
1	RSUD Panembahan Senopati	B-Umum	Akreditasi
2	RSPA dr. Suradji Hardjolukito	B-Umum	Akreditasi
3	RSU PKU Muhammadiyah	C-Umum	Akreditasi
4	RSU Nur Hidayah	D-Umum	Akreditasi
5	RSU Santa Elizabeth	D-Umum	Akreditasi
6	RSU Permata Husada	D-Umum	-
7	RSU Rahma Husada	D-Umum	Akreditasi
8	RSU Rajawali Citra	D-Umum	Akreditasi
9	RSU Griya Mahardika	C-Umum	Akreditasi
10	RSK Ibu dan Anak Umami Kasanah	C-Khusus KIA	Akreditasi
11	RSK Bedah Ringroad Selatan	C-Khusus Bedah	Akreditasi
12	RSK Paru Respira	C-Khusus Paru	Akreditasi
13	RSK Ibu dan Anak Adinda	C-Khusus KIA	-

No.	Rumah Sakit	Kelas	Akreditasi
14	RSK Ibu dan Anak Kahyangan	C-Khusus KIA	-
15	RSK Bedah Adelia	C-Khusus Bedah	Akreditasi
16	RS UII	C-Umum	-

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Selain fasilitas fisik sebagaimana diuraikan di atas, fasilitas lain yang disediakan pemerintah Kabupaten Bantul adalah pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk Bantul melalui kepesertaan JKN. Pada tahun 2020 kepesertaan JKN sebesar 841.108 jiwa atau 88,10%. Data kepesertaan JKN disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 34 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan	2019		2020	
		Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%
1	Jaminan Kesehatan Nasional				
1.1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	443.462	53,61	445.505	46,66
1.2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	46.674	5,64	50.887	5,33
1.3	Pekerja Penerima Upah (PPU)	216.212	26,14	224.980	23,57
1.4	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)	88.543	10,70	88.688	9,29
1.5	Bukan Pekerja	32.340	3,90	31.048	3,25
	Jumlah penduduk yang terdaftar JKN	827.231	87,50	841.108	88,10
	Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN	118.210	12,50	113.598	11,90
	Total penduduk Kab Bantul	945.441	100,00%	954.706	100,00

Sumber: BPJS Kesehatan, 2021

Dari total kepesertaan JKN tersebut, Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN tahun 2020 merupakan kepesertaan dengan jumlah terbesar yaitu 445.505 jiwa atau 46,66%. Kepesertaan JKN-PBI dari APBD sebesar 50.887 jiwa atau 5,33%. Hal tersebut merupakan perubahan program pelayanan kesehatan

bagi penduduk miskin/Jamkesda menjadi peserta JKN. Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 224.980 jiwa atau 23,57%, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 88.688 jiwa atau 9,29% dan Bukan Pekerja (BP) sebesar 31.048 atau 3,25%. Jumlah Penduduk yang belum terdaftar kepesertaan JKN sebesar 113.598 jiwa atau 11,90%, dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul adalah dengan berkoordinasi secara intensif dengan *stakeholder* terkait. Tingginya jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya.

3) Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini perlu diimbangi dengan regulasi agar tenaga kerja benar-benar kompeten di bidangnya, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan yang dapat berakibat fatal. Regulasi tersebut antara lain dengan menerbitkan aturan bahwa setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisisionis, analis, radiographer, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki surat izin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya.

Tabel 2 35 Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter Umum	127	154	238	307	417
2	Jumlah Dokter Spesialis	61	65	202	215	304
3	Jumlah Penduduk	928.676	931.356	939.718	949.325	954.706
4	Rasio Dokter Umum (per 1000 penduduk)	0,14	0,16	0,25	0,32	0,43
5	Rasio Dokter Spesialis (per 1000 penduduk)	0,065	0,070	0,21	0,23	0,32

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Pada Tahun 2020 rasio dokter umum per 1000 penduduk mencapai 0,43 artinya satu dokter melayani 4.367 penduduk. Hal

ini menunjukkan masih kurangnya dokter di Kabupaten Bantul. Upaya pemenuhan kebutuhan dokter dengan cara rekrutmen tenaga dokter baik melalui tenaga kontrak maupun ASN.

4) Pelayanan Kesehatan Lansia

Pelayanan kesehatan lansia meliputi promotif dan preventif sesuai standar (SPM) meliputi pemeriksaan tanda vital, tes kolesterol, gula darah dan tes gangguan memori. Pelayanan ini dilaksanakan bersama oleh dan dari masyarakat melalui Posyandu Lansia. Pada Tahun 2020 telah terbentuk Posyandu Lansia sejumlah 1.034, artinya telah terdapat Posyandu Lansia di setiap padukuhun di Kabupaten Bantul. Tidak ada peningkatan jumlah posyandu lansia dari tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan adalah skrining, senam lansia dan penyuluhan kesehatan.

b. Kesehatan Masyarakat

1) Balita Gizi Buruk

Status gizi Balita dapat diketahui dari berat badan menurut umur, yaitu membandingkan antara berat badan menurut umur ataupun panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

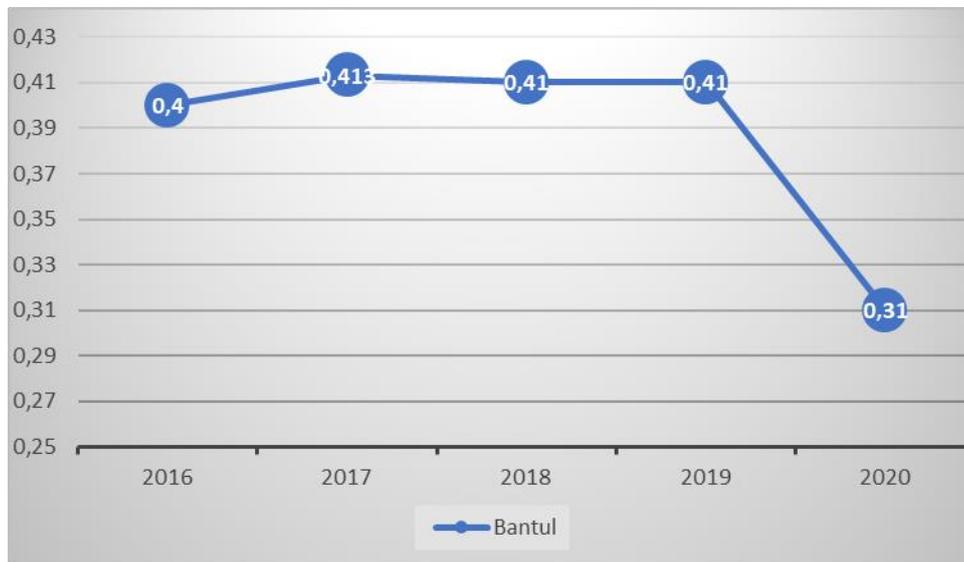
Tabel 2 36 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Balita yang diukur	48.750	48.895	48.943	48.502	18.621
Jumlah Balita Gizi Buruk	195	202	202	199	57
Prevelensi Balita Gizi Buruk	0,4%	0,413%	0,41%	0,41%	0,31%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Dengan adanya pandemi Covid-19, pengukuran berat badan balita pada tahun 2020 dilaksanakan secara sampling. Balita status gizi buruk sebesar 0,31%. Masih adanya kasus gizi buruk disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, sanitasi lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR dan adanya permasalahan sosial di

dalam keluarga. Prevalensi gizi buruk pada Balita disajikan pada grafik berikut.

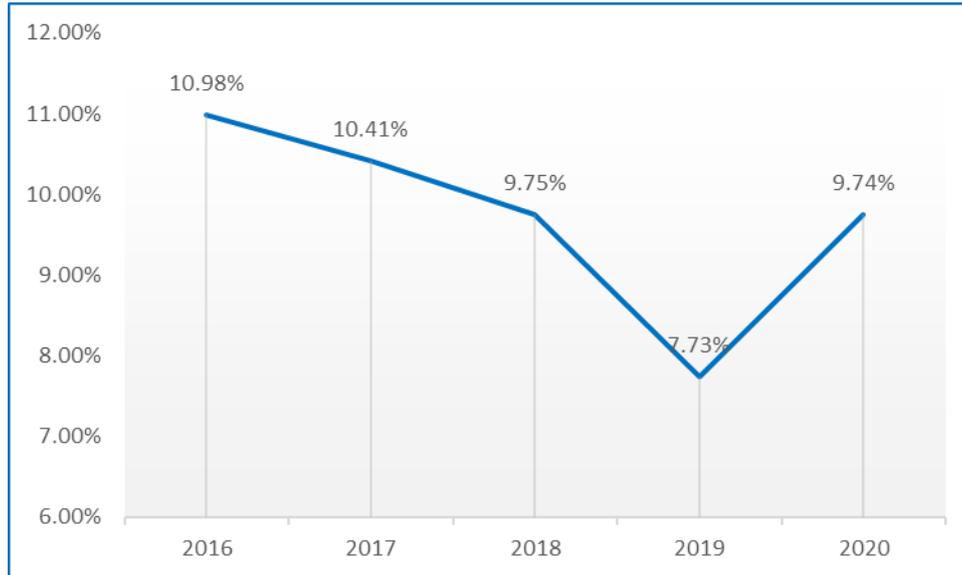


Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 36 Prevalensi Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten Bantul

Gizi buruk dapat mengarah pada stunting. Stunting adalah kondisi tubuh anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ukuran tubuh yang lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Kondisi stunting tidak bisa dikembalikan seperti semula. Kondisi stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan).

Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan prevalensi balita stunting diantaranya adalah kampanye dan deklarasi penanggulangan stunting, penyusunan peraturan bupati dan RAD Stunting, peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan, konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis anak pada balita stunting, dan pendampingan balita stunting oleh kader.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 37 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun 2019 Kabupaten Bantul ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai Lokasi khusus (lokus) dalam penanggulangan Stunting Tahap 2. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Prevalensi stunting berhasil diturunkan secara signifikan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 10,41% menurun pada tahun 2018 menjadi sebesar 9,75% dan menurun lagi pada tahun 2019 menjadi 7,73%. Angka prevalensi kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%. Data jumlah dan prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 37 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting
Kabupaten Bantul Tahun 20216-2020

Tahun	Jumlah Balita yang Diukur	Jumlah Balita Stunting	Prevalensi Balita Stunting (%)
2016	48,476	5,325	10.98%
2017	47,899	4,987	10.41%
2018	48,553	4,733	9.75%
2019	48,181	3,725	7.73%
2020	18,638	1,816	9.74%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Determinan masalah penyebab stunting di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 38 Penyebab Balita Stunting di Kabupaten Bantul

No	Analisa Penyebab	Balita Stunting (%)
1	Keluarga Gakin	47,29
2	Usia Ibu<20	3,05
3	Usia Ibu>35	9,20
4	Ibu KEK Sewaktu Hamil	15,60
5	Ibu Anemia Sewaktu Hamil	11,41
6	Tidak ASI Eksklusif	21,04
7	Pengasuhan Anak kepada Orang Lain	2,7
8	Pengasuhan Anak kepada Campuran	30,03

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

2) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum. Data capaian PHBS tahun 2020 di Kabupaten Bantul pada semua tatanan disajikan pada tabel di bawah. Pola hidup sehat masih rendah di tingkat rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum. Lingkungan permukiman kumuh berpotensi menjadi semakin buruk dengan tren pola hidup sehat di lingkungan rumah tangga yang masih rendah.

Tabel 2 39 Hasil Capaian Tatanan PHBS di Kabupaten Bantul

No.	Tatanan PHBS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga	41,21%	47,14%	50,27%	53,00%	53,10%
2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	88,31%	83,82%	83,82%	91,67%	91,70%
3	Institusi Pendidikan	44,38%	54,77%	54,77%	61,00%	62,20%
4	Tempat Kerja	26,15%	39,15%	39,15%	41,21%	41,21%
5	Tempat-tempat Umum	63,18%	58,52%	58,52%	59,00%	59,15%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

3) Sanitasi

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga.

4) Akses Jamban

Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) telah dilakukan oleh 27 puskesmas dengan memotret kondisi kesehatan dari anggota keluarga sekaligus memberikan intervensi dan edukasi kesehatan salah satunya adalah tersedianya akses/jamban sehat untuk keluarga sebesar 100%, meskipun masih ada yang menggunakan jenis cemplung dan plengsengan. Adanya jamban jenis cemplung/plengsengan yang berpotensi mengakibatkan memburuknya kualitas lingkungan permukiman, terutama di permukiman padat dapat berdampak pada pola hidup yang kurang sehat dan kesehatan masyarakat. Data penggunaan jamban di Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 40 Data penggunaan jamban di Kabupaten Bantul Tahun 2020

Kapanewon	Jenis Kloset		
	Cemplung/ Cubluk	Leher Angsa	Plengsengan
Bambanglipuro	39	6.713	34
Banguntapan	20	7.443	89
Bantul	26	7.377	136
Dlingo	1465	5.131	66
Imogiri	294	8.968	49
Jetis	90	7.500	49
Kasihan	225	9.166	79
Kretek	8	4.391	18
Pajangan	507	5.590	56
Pandak	369	8.311	80
Piyungan	161	6.639	31
Pleret	83	6.677	71
Pundong	33	6.981	82

Kapanewon	Jenis Kloset		
	Cemplung/ Cubluk	Leher Angsa	Plengsengan
Sanden	76	5.482	42
Sedayu	435	6.203	30
Sewon	47	9.228	35
Srandakan	97	5.369	16
Jumlah Rumah Tangga	3.975	117.169	963

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 2021

5) Pengawasan Kualitas Air

Kegiatan pengawasan kualitas air meliputi pengawasan kualitas air baik secara internal maupun eksternal serta pembinaan DAM dan pengelola air minum pedesaan Yogyakarta. Pengawasan dilakukan terhadap air bersih maupun air minum. Pengawasan dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perusahaan Depot Air Minum (DAM), Pengelola Air Minum Pedesaan (Pamdes), dan sumber air bersih masyarakat (sumur gali, mata air, dan lain-lain). Kegiatan pengawasan eksternal dilakukan dengan pengambilan sampel dan pengujian kualitas air bagi masyarakat dan dunia usaha. Pengawasan kualitas mencakup sampel sejumlah 2.573 sampel, yang terdiri dari sampel air minum yang bersumber dari PDAM adalah lima sampel tiap kapanewon dan jumlah sampel air bersih sebanyak lima sampel tiap kalurahan.

c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Data penyakit menular di Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 41 Data Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Angka Kesakitan	Jumlah Kasus				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Penyakit Menular					
1	Tuberkulosis (TB) BTA Positif	295	175	344	112,9	343
2	Jumlah Kasus HIV	144	49	184	127	103
3	Jumlah Kasus AIDS	55	9	36	22	38
4	Jumlah Kasus Syphilis	18	100	8	64	3
5	Kusta	11	7	15	8	4

No	Angka Kesakitan	Jumlah Kasus				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Jumlah Kasus Campak	124	-	3	1	-
7	Pneumonia Balita ditemukan dan ditangani	744	1.197	1.093	941	424
8	Jumlah kasus diare ditemukan dan ditangani	4.822	5.481	4.877	4.622	6.005
9	AFP Rate (non polio) < 15 th	6	10	9	5	3
10	DBD	2.442	538	181	150	128
11	Malaria	-	3	-	7	3
12	Leptospirosis	74	94	93	92	79

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

1) Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Jumlah kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 42 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul

No	Tahun	Jumlah Kasus	IR (‰)	Jumlah Meninggal	CFR (%)
1	2016	2442	2,62	4	0,16
2	2017	538	0,55	2	0,37
3	2018	182	0,18	0	0
4	2019	1424	1,5	4	0,6
5	2020	1222	1,3	4	0,3

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Angka kesakitan DBD pada tahun 2020 sebesar 129 per 100.000 penduduk (1.222 kasus) menurun dibanding tahun 2019 yaitu 140 per 100.000 penduduk (1424 kasus). Pada tahun 2020 terdapat empat kematian penderita DBD, sama dibandingkan tahun 2019.

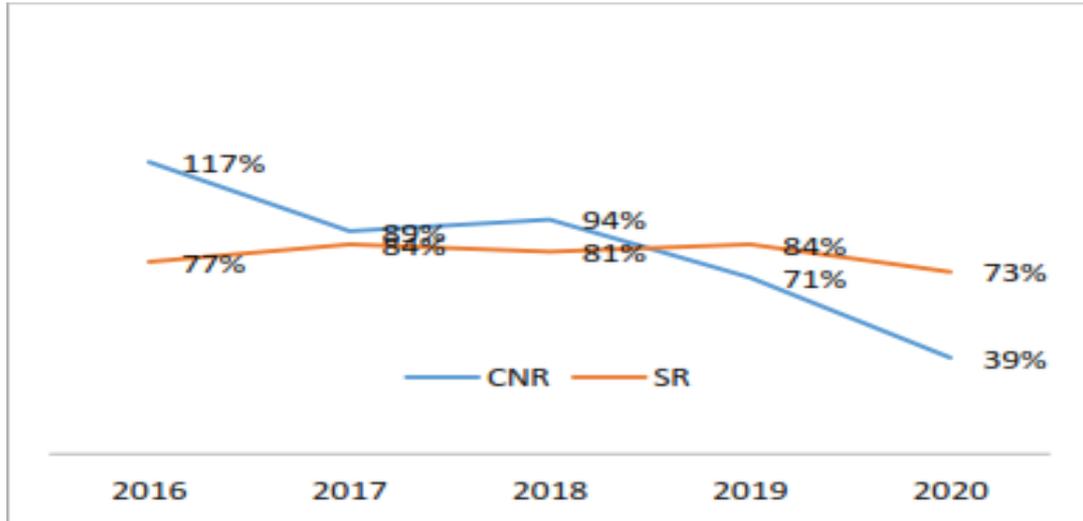
Berbagai upaya yang dilaksanakan dalam menangani kasus DBD yang meningkat antara lain melalui surat edaran Kepala Dinas Kesehatan No tentang 443/497/2019 Kewaspadaan Dengue; Peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD; Pemberdayaan kader-kader padukuhan, remaja dan siswa SD untuk PSN; Melakukan dan

koordinasi dan komunikasi di tingkat Kapanewon; Melaksanakan foging sesuai Standar Prosedur yang telah ditetapkan; Pelaksanaan pelayanan deteksi dini DB di puskesmas pada semua kasus demam yang sudah ≥ 2 hari, dengan cara pemeriksaan menggunakan antigen dengue; Promosi kesehatan tentang kewaspadaan DB melalui media elektronik; Pembagian Larvasida di wilayah endemik pada saat PE; KIE dan kerjasama lintas program dan lintas sektor; Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui gertak PSN; dan Foging Fokus untuk memutus mata rantai penularan.

2) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular Tuberkulosis (TB)

Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh mycobacterium, yang berkembang biak di dalam bagian tubuh di mana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Tuberkulosis adalah penyakit yang paling umum yang dialami oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang bisa menjaga kebersihan yang ada dilingkungannya.

Permasalahan penanggulangan TBC di Kabupaten Bantul masih terkait dengan penemuan kasus yang belum mencapai target dan rendahnya angka kesembuhan. Cakupan Notifikasi semua kasus TBC (*Case Notification Rate/CNR*) yang diobati per 100.000 penduduk dan angka keberhasilan (*Success Rate/SR*) dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 38 Angka Penemuan Kasus dan Kesembuhan TB di Kabupaten Bantul

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa angka Notifikasi semua kasus TBC (*Case Notification Rate/CNR*) mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai 2020, pada tahun 2020 ini angka penemuan TBC mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan angka kunjungan pasien pelayanan mengalami penurunan sehingga mempengaruhi angka penemuan kasus TBC dilayanan. Selanjutnya, terkait dengan angka keberhasilan TBC yang belum mencapai target hal ini disebabkan masih tingginya angka gagal, putus berobat dan meninggal.

Angka penemuan kasus TB (*case detection rate*) terlihat menurun, upaya pemerintah dan masyarakat dalam menemukan kasus TB secara aktif dan selektif (*Active Selective Case Finding*). Namun demikian, angka kesembuhan (*cure rate*) tampak fluktuatif, dan terjadinya penurunan cakupan disebabkan antara lain karena putus obat dari pasien TB dan adanya kasus TB dengan jenis *Multi Drug Resisten* (TB MDR). Diperlukan upaya yang lebih kuat dalam pemutusan rantai penularan TBC.

Upaya penanganan kasus TB antara lain adalah Penyusunan RAD penanggulangan TB; Meningkatkan peran serta dari layanan

kesehatan swasta dalam penemuan TB melalui supervisi oleh wasor TB/*District officer* TB, dan pengelola program HIV; Kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat; Kolaborasi dengan PD Aisyiyah; Revitalisasi Gerakan Terpadu Daerah (Gerduda) Kapanewon; Penyediaan ruang tersendiri untuk poli batuk dan TB MDR di Puskesmas; dan Pendampingan penemuan TB di Puskesmas melalui kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan fokus pada penyegaran tentang strategi DOTS, *Active Selective Case Finding* (ASCF) melalui pemeriksaan dahak pada suspek, Pemberian makanan tambahan pada penderita TB yang sedang diobati.

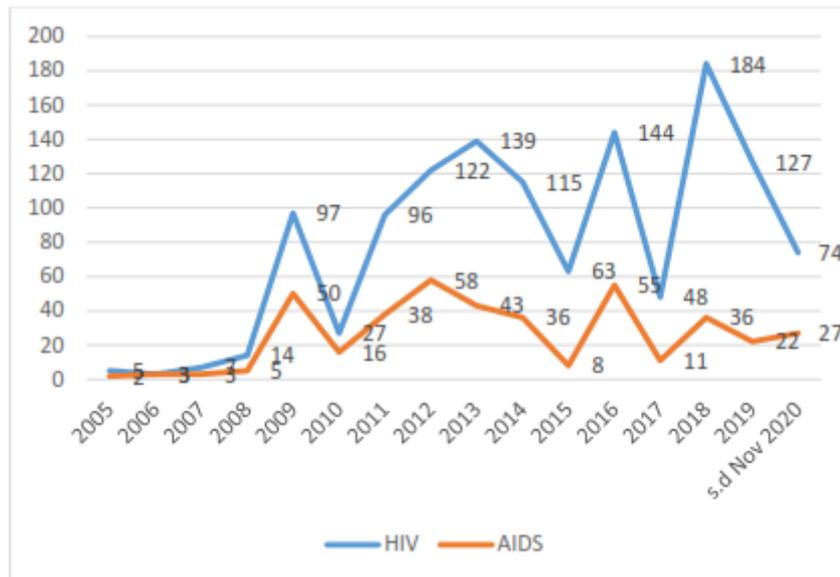
3) Pencegahan dan Penanggulangan Leptospirosis

Pada tahun 2020 telah ditemukan kasus leptospirosis sebanyak 79 kasus dengan satu di antaranya meninggal dunia, turun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 92 kasus. Angka kesakitan leptospirosis pada tahun 2020 adalah 8,29 per 100.000 penduduk, menurun dibandingkan tahun 2019 yaitu 9,79 per 100.000 penduduk (98 kasus dengan 1 kematian). Upaya-upaya komprehensif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan leptospirosis telah dilakukan meliputi sosialisasi penyakit leptospirosis, koordinasi lintas sektor dan program, peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam tatalaksana kasus leptospirosis serta peningkatan surveilans leptospirosis sebagai upaya kewaspadaan dini dan respon terhadap penyakit potensial kejadian luar biasa dan wabah.

4) Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS

Penyebaran HIV-AIDS memang sangat sulit terdeteksi. Data yang didapatkan saat ini hanya sebagian kecil dari besarnya jumlah orang yang sebenarnya mengidap HIV-AIDS. Banyak orang yang tidak memeriksakan dirinya sehingga angka pasti jumlah ODHA hingga saat ini tidak dapat diketahui. Inilah yang dinamakan

fenomena gunung es. Masih banyak ODHA yang tidak terdeteksi hingga hari ini. Lebih dari itu, banyak ODHA yang tidak sadar bahwa saat ini dirinya terjangkit HIV. Berikut disajikan grafik penemuan HIV AIDS tahun 2005 - 2020.



Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 39 Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul

Angka prevalensi HIV-AIDS sampai tahun 2020 sebesar 0,01% dari target <0,5%. Angka prevalensi ini masih termasuk dalam kategori endemis rendah (<0,5%). Bila di dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan kasus dari 127 kasus menjadi 74 kasus. Angka ini menunjukkan endemisitas kasus HIV termasuk baik, jauh lebih rendah dibandingkan target sebesar 0,5%. Prevalensi HIV AIDS tahun 2016 – 2020 digambarkan dalam grafik berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 40 Prevalensi HIV AIDS di Kabupaten Bantul

Akselerasi pengendalian HIV-AIDS pada tahun 2019 dilakukan melalui kegiatan peningkatan akses pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko, yaitu Bumil, TBC dan Penderita Infeksi Menular Seksual (IMS) dengan pengadaan bahan medis habis pakai yang didistribusikan ke seluruh fasyankes yang sudah mampu melaksanakan pemeriksaan HIV (27 Puskesmas dan 8 Rumah Sakit); Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial serta kelompok berisiko rendah (Bumil dan penderita TB) dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus melalui Voluntary Counseling and Testing (VCT) di Puskesmas; Klinik layanan IMS di 6 (enam) puskesmas yaitu Puskesmas Kretek, Imogiri I, Srandakan, Kasihan II, Dlingo I dan Sedayu I yang intensif melaksanakan penyuluhan, pelayanan VCT; Klinik layanan Harm Reduction di Puskesmas Banguntapan II. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) yang ditujukan bagi Pengguna Narkoba Suntik (Penasun). Sedangkan bagi penasun yang sulit untuk terapi metadon, akan diberikan Layanan Alat Suntik Steril (LASS); Klinik pelayanan VCT di 27 Puskesmas dan 8 RS (RS PKU, RS Elizabeth,

RS Nur Hidayah, RS Rahma Husada, RS Rajawali Citra, RSK Paru Respira, RSPAU Harjolutito, RS Panembahan Senopati). Layanan Care Support and Treatment (CST) atau Pengobatan Dukungan Perawatan (PDP) di 2 (dua) RS dan 1 (satu) Puskesmas, yaitu RSUD Panembahan Senopati, RSPAU Hardjolukito dan Puskesmas Kretek; Penambahan layanan PDP dengan melatih puskesmas (Puskesmas Kasihan II, Puskesmas Banguntapan I, Puskesmas Srandakan, Puskesmas Piyungan dan Puskesmas Sedayu II) untuk memudahkan akses pengobatan Orang dengan HIV AIDS (ODHA); dan Peningkatan penemuan penderita melalui Pengendalian Penularan Ibu dan Anak (PIIA) dengan cara tes VCT pada semua ibu hamil.

d. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Data penyakit tidak menular di Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 43 Data Tidak Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

NO	Angka Kesakitan	Jumlah Kasus				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Penyakit Tidak Menular					
1	Jumlah Kasus IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun	254	74	19	44	6
2	Jumlah tumor/benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun	17	4	31	45	2
3	Kalurahan/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam	26	14	9	12	81
4	Diabetes Melitus	20.969	50.242	33.013	43.696	18.516
5	Gangguan Jiwa	3.875	6.864	6.844	9.761	2.097
6	Hipertensi/tekanan darah tinggi	44.954	50.242	69.228	91.266	58.069
7	Obesitas	398	406	994	239	NA

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

1) Diabetes Mellitus (DM) dan Pengendalian kasus Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD)

Tahun 2019 dilakukan upaya screening awal untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular DM dan PJPD.

Pada tahun 2020 pelayanan pada DM sebanyak 18.516 jiwa menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 43.696 kasus, sedangkan pelayanan pada PJPD sebanyak 58.069 jiwa menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 91.266 kasus.

2) Deteksi Dini NAPZA

Upaya yang dilakukan pemerintah melalui Dinkes bekerjasama dengan BNNK Bantul dan RSPAU dr S. Harjolutomo serta Paskas TNI AU dan Kodim 0729 Bantul.

3) Pengendalian kasus kesehatan jiwa

Pada tahun 2020 pelayanan pada ODGJ sebanyak 2.097 jiwa menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 9.761 kasus.

e. Kewaspadaan Dini dan Respon terhadap Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah.

Fungsi utama surveilans penyakit adalah sebagai bentuk kewaspadaan dini dan respon terhadap potensial KLB dan wabah. Pada tahun 2018 telah terantisipasi 9 (sembilan) kasus kejadian potensial KLB di wilayah Kabupaten Bantul dengan 6 (enam) di antaranya adalah kasus keracunan makanan. Secara kuantitas, jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2017 yaitu 14 kasus. pada tahun 2019 masih didominasi dengan kejadian Keracunan Makanan yaitu 9 (Sembilan) kasus diikuti adanya dugaan kasus Pertusis, gastroenteritis dan GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies) masing-masing 1 (satu) kasus. Capaian Accute Flaccid Paralysis (AFP) sebagai upaya kewaspadaan dini terhadap adanya virus Polio liar di masyarakat sebanyak 5 (lima) kasus. Surveilans Campak mencatat sebanyak 199 suspek dengan hasil konfirmasi Campak positif 1 kasus dan Rubella positif sebanyak 14 kasus.

Pada tahun 2020 terdapat 3 jenis kejadian luar biasa yaitu: GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies), keracunan makanan dan wabah Covid-19 (merscov) yang masih menunjukkan peningkatan,

data sampai dengan per 31 Juli 2021 terkonfirmasi sebanyak 42.374 positif terjangkit virus dengan 988 kasus kematian. Sebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Bantul sampai dengan per 31 Juli 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 44 Jumlah Sebaran Kasus Covid per Kapanewon di Kabupaten Bantul
(per 31 Juli 2021)

No.	Kapanewon	Dalam Perawatan	Meninggal	Sembuh	Jumlah Kasus Positif
1	Bambanglipuro	894	31	1.106	2.031
2	Banguntapan	2.229	121	3.734	6.084
3	Bantul	1.855	87	2.121	4.063
4	Dlingo	170	24	437	631
5	Imogiri	887	63	1.679	2.629
6	Jetis	830	83	2.455	3.368
7	Kasihan	1.014	65	2.275	3.354
8	Kretek	406	35	824	1.265
9	Pajangan	406	34	1.030	1.470
10	Pandak	777	43	1.455	2.275
11	Piyungan	574	24	634	1.232
12	Pleret	660	76	1.461	2.197
13	Pundong	468	27	689	1.184
14	Sanden	268	35	1.342	1.645
15	Sedayu	407	50	1.828	2.285
16	Sewon	1.389	136	3.663	5.188
17	Srandakan	341	54	1.078	1.473
	Jumlah	13.575	988	27.811	42.374

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

f. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Kesehatan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 45 Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	96,77	72,8	108,3	99,49	157,6
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	7,65	8,74	8,28	8,33	6,93
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,40	0,41	0,41	0,41	0,31

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Prevalensi Penderita HIV (Angka)	0,083	0,09	0,19	0,12	0,01
Angka Kesakitan (Incidence Rate DBD) per 100.000 Penduduk	237,75	57,98	19,52	140	128
Net Death Rate per 1000 pasien	18,69	16,98	22,62	18,7	21,17

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Dari data dapat kita lihat adanya peningkatan nilai Angka Kematian Ibu pada tahun 2020, kondisi ini disebabkan karena kurangnya deteksi dini kondisi ibu hamil yang diakibatkan keterbatasan akses pelayanan kesehatan akibat pandemi Covid-19.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu jalan harus dalam kondisi baik untuk memperlancar transportasi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi, lokasi ruas jalan provinsi di Kabupaten Bantul sepanjang 162,150 km. Sedangkan, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 265 Tahun 2017 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 376 ruas, dengan panjang 624,47 Km.

Tabel 2 46 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020

Tahun	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
2017	624.47	463.23	74.18	161.24	25.82
2018	624.47	465.73	74.58	158.74	25.42
2019	624.47	468.97	75.10	156.64	24.90
2020	624.47	470.98	75.42	153.49	24.58

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik dan sedang, sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak dan rusak berat. Pada Tahun 2020 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 470,98 km (75,42%) naik dari tahun sebelumnya sepanjang 468,97 km (75,10%) pada Tahun 2019. Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 156.64 km, sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan dikabupaten bantul bisa dalam kondisi mantap.

b. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI terdiri dari 100 DI Permukaan dan 18 DI Air Tanah dengan luas total 9.368 Ha.

Kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik tahun 2019 yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul adalah 82,15% (193.125,6m) melebihi dari target yang ditetapkan

82% (192.773m). Data target dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 47 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik			
	Target (m)	%	Realisasi (m)	%
2016	190.422,09	81,00	193.957,00	82,50
2017	188.071,20	80,00	188.541,38	80,20
2018	189.247,65	80,5	190.422,09	81,00
2019	192.773,00	82,00	193.125,60	82,15
2020	193.644,82	81,50	194.761,54	81,97

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Luas sawah sepanjang DI kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik mencapai 80,01% (6.908,06), tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 82,66% (7.136,86Ha). Tidak tercapainya target DI yang terlayani air irigasi pada tahun 2020 disebabkan oleh refocusing anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi yang menyebabkan DI yang terlayani menjadi berkurang.

Pembangunan saluran irigasi diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai). Tabel berikut menunjukkan luas Daerah Irigasi yang terairi dengan baik.

Tabel 2 48 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
		Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
1	2016	6.820,86	79,00	7.004,00	81,12
2	2017	6.907,20	80,00	7.007,35	81,16
3	2018	7.050,52	81,16	6.945,19	80,44

No	Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
		Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
4	2019	7.093,69	82,16	7.096,28	82,19
5	2020	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Luas sawah sepanjang DI kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik mencapai 80,01% (6.908,06), tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 82,66% (7.136,86Ha). Tidak tercapainya target DI yang terlayani air irigasi pada tahun 2020 disebabkan oleh refocusing anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi yang menyebabkan DI yang terlayani menjadi berkurang.

c. Drainase Dalam Kondisi Baik

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Kondisi sistem drainase di Kabupaten Bantul masih merupakan drainase gabungan dengan sistem drainase terbuka, di mana pembuangan air limbah dan air hujan serta air kotor disalurkan dalam satu saluran.

Kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik. Presentase kinerja penanganan banjir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kejadian bencana cuaca ekstrem berupa siklon tropis yang menyebabkan banjir.

Tabel 2 49 Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target		Realisasi		Kinerja (%)
		%	Penanganan Banjir (ha)	%	Penanganan Banjir (ha)	
1	2016	13,78	123,13	20,30	181,43	147,71
2	2017	20,56	183,71	24,90	222,49	121,11

No	Tahun	Target		Realisasi		Kinerja (%)
		%	Penanganan Banjir (ha)	%	Penanganan Banjir (ha)	
3	2018	27,34	244,30	28,84	257,70	105,49
4	2019	34,12	303,81	34,00	257,70	99,65
5	2020	40,9	365,47	40,9	365,47	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021
Ket.: Luas daerah rawan banjir luapan tahun 2014 adalah 893,56 Ha

d. Tempat Permakaman Umum

Penyediaan permakaman umum menjadi sebuah upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan wilayah dan dinamika kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan lahan seluas 4,6 Ha sebagai TPU yang berada di dusun Tilaman Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri. TPU ini dikelola oleh UPT di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu terdapat juga lahan permakaman di Tegaldowo, Bantul. Lahan permakaman disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul bagi warga perumahan maupun masyarakat umum namun pada masa pandemi dapat dimanfaatkan bagi jenazah yang meninggal akibat Covid-19. Sampai saat ini belum ada jenazah Covid-19 yang dimakamkan di Tilaman, karena tidak ada penolakan dari warga untuk memakamkan jenazah Covid-19 di permakaman warga.

e. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Bantul sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 50 Produk Perencanaan dan Peraturan Tata Ruang di Kabupaten Bantul

No.	Produk Perencanaan Tata Ruang
1.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
2.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon 2018-2038

No.	Produk Perencanaan Tata Ruang
3.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan 2018-2038
4.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang
5.	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sejumlah 17 Kapanewon : RDTR dan PZ Kapanewon Pajangan, Imogiri, Pleret, Pandak, dan Sedayu (2014) RDTR dan PZ Kapanewon Piyungan, dan Pantai Selatan (Sanden, Kretek, Srandakan) (2015) RDTR dan PZ Kapanewon Pundong dan Jetis (2016) RDTR dan PZ Kapanewon Bambanglipuro, Dlingo,(2017) Raperda RDTR dan PZ Piyungan, Pansela, Jetis, Pundong (2017) RDTR dan PZ Kapanewon Sewon dan Kasihan (2018) RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaaan (2018) Draft RDTR Pansela, Perkotaan, dan Perdesaan (2020)
6.	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) : RTBL Kawasan Srandakan, Kawasan Bantul Kota , Kawasan Sanden (2018) RTBL Zona pengembangan Kawasan Parangtritis II (2018) RTBL Jetis, Kawasan Industri Kasihan, Watu Gilang, Depok, Parangtritis (2019) RTBL Segoroyoso, RTBL Imogiri, Masjid Pathok Negoro Babadan, Masjid Pathok Negoro Dongkelan (2020)
7.	Dokumen Draft Peninjauan Kembali RTRW (2020)
8.	Masterplan dan DED : Desain Citra Kota Bantul, Jalan Jendral Sudirman (2017) Masterplan dan DED Gerbang masuk Kabupaten Bantul dan Kawasan Lindung Hargodumilah (2018) Masterplan Watu Amben (2019)

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021

Penyusunan dokumen RDTR di kabupaten Bantul saat ini masih berupa kajian yang dibagi menjadi 4 (empat), yaitu RDTR Perkotaan, RTDR Pansela, RDTR Bantul Barat, dan RDTR Bantul Timur. Sampai saat ini dokumen RDTR yang telah disusun dalam Peraturan Daerah adalah RDTR dan PZ BWP Sewon dan RDTR dan PZ BWP Kasihan, yang kemudian akan masuk dalam RDTR Perkotaan. RDTR Pansela ditargetkan selesai akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022, dan RDTR Perkotaan ditargetkan selesai tahun 2022. RDTR Bantul Barat dan RDTR Bantul Timur ditargetkan selesai tahun 2023. Proses penyusunan RDTR yang membutuhkan waktu cukup lama ini, disebabkan antara lain oleh tata cara dan tata kala proses penyusunan dan tahapan yang cukup panjang dan melibatkan unsur eksternal lintas sektor dan instansi, baik di

lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, pemerintah DIY, maupun Kementerian/Lembaga pemerintah pusat.

Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 telah dilaksanakan pada tahun 2016. Namun pada tahun 2018 peninjauan kembali disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 6 tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah. Hasil rekomendasi PK RTRW yaitu dilakukan review RTRW.

Pada Tahun 2019 dilaksanakan kegiatan perbaikan revisi RTRW agar sesuai dengan Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan kegiatan konsultasi peta RTRW ke Badan Informasi Geospasial (BIG). Untuk tahapan persetujuan substansi RTRW ke Kementerian ATR, masih diperlukan persyaratan yang harus dilengkapi pada tahun 2020 antara lain:

- 1) Berita Acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi dengan DPRD;
- 2) Rekomendasi Gubernur terhadap rancangan RTRW;
- 3) SK Bupati tentang rekomendasi hasil PK RTRW (sedang dilaksanakan);
- 4) Tabel sandingan RTRW eksisting dengan rancangan perubahan RTRW;
- 5) Surat pernyataan Bupati bahwa bertanggungjawab terhadap kualitas raperda RTRW;
- 6) Konsultasi publik minimal dua kali;
- 7) Berita Acara dengan kabupaten yang berbatasan;
- 8) Berita acara yang dikeluarkan oleh BIG perihal peta dasar RTRW;
- 9) KLHS RTRW yang sudah divalidasi; dan
- 10) Surat permohonan persetujuan substansi Materi teknis dan album peta RTRW;

KLHS RTRW telah divalidasi oleh DIY, proses Peninjauan Kembali RTRW, saat ini tengah berproses penyampaian materi untuk evaluasi gubernur dan akan dilanjutkan untuk memperoleh persetujuan DPRD. Setelah itu akan berproses di Kementerian ATR/BPN. Tatakala optimis diperkirakan akhir tahun dapat disampaikan Kementerian ATR, namun tatakala pesimis diperkirakan akan selesai pada triwulan pertama 2022. Target Kabupaten Bantul adalah RTRW selesai di tahun 2021.

f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tujuan penyelenggaraan penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kondisi ruang tersebut dapat dipenuhi melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk dapat menjaga konsistensi dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, maka perlu dilakukan upaya monitoring terhadap pemanfaatan ruang yang berjalan serta mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada terhadap rencana tata ruang wilayahnya. Hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 51 Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Bantul

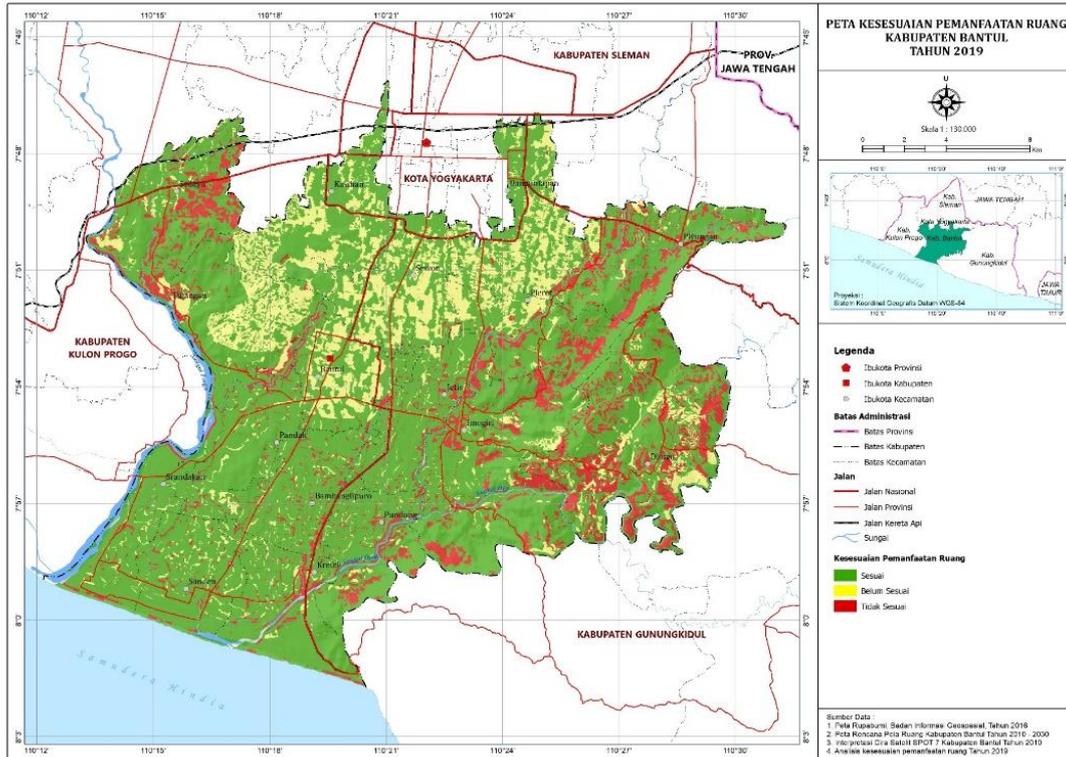
Fungsi Kawasan		Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)
		Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai	
LINDUNG	Kawasan Hutan Lindung	1009,82	33,15	228,01	1.270,98
	Kawasan Resapan Air	2.231,20	0	408,53	2.639,71
	Sempadan Pantai	187,33	0	67,09	254,42
	Sempadan Sungai	1.716,24	0	657,93	2.374,17
	Kawasan Cagar Budaya	146,48	20,14	109,02	275,64
Jumlah Lindung (Ha)		5.291,07	53,29	1.470,58	6.814,92
% terhadap Kawasan Lindung		77,64	0,78	21,58	100,00
% terhadap Kabupaten Bantul		9,73	0,37	3,52	13,62
BUDIDA	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	10.110,43	752,34	73,23	10.936,00

Fungsi Kawasan	Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)
	Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai	
Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	7.005,58	5.182,31	7,87	12.195,75
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	410,27	383,85	385,39	1.179,52
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	8.284,00	654,09	1.728,10	10.666,19
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	3.660,16	2,15	1.122,99	4.785,30
Kawasan Peruntukan Industri	1.776,79	-	686,96	2.463,75
Kawasan Peruntukan Pariwisata	982,96	-	-	982,96
Jumlah Budidaya (Ha)	32.230,19	6.974,74	4.004,54	43.209,47
% terhadap Kawasan Budidaya	74,59	16,14	9,27	100
% terhadap Kabupaten Bantul	64,43	13,94	8,01	86,38
TOTAL (Ha)	37.521,26	7.028,03	5.475,12	50.024,41
% terhadap Kabupaten Bantul	75,01	14,05	10,94	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan pola ruang diperoleh hasil bahwa tingkat kesesuaian pola ruang Kabupaten Bantul tahun 2020 dengan kriteria ‘sesuai’ sebesar 75,01%; ‘belum sesuai’ sebesar 14,05%; dan ‘tidak sesuai’ sebesar 10,94%.

Berdasarkan penilaian kesesuaian pola ruang tersebut, maka tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Bantul menurut klasifikasi dari Permen ATR/Kepala BPN No. 9/2017 secara umum berada pada klasifikasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kurang berkualitas (<80%), artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Gambar 2 41 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019

g. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berdasar pasal 20 UU No. 26/2007, terdapat dua jenis RTH yaitu RTH publik dan RTH privat. Proporsi luasan RTH pada wilayah kota adalah minimal harus memiliki luasan 30% dari luas total wilayah, dengan porsi 20% sebagai RTH publik. Jenis dan luas Ruang Terbuka Hijau dapat kita lihat pada tabel berikut:

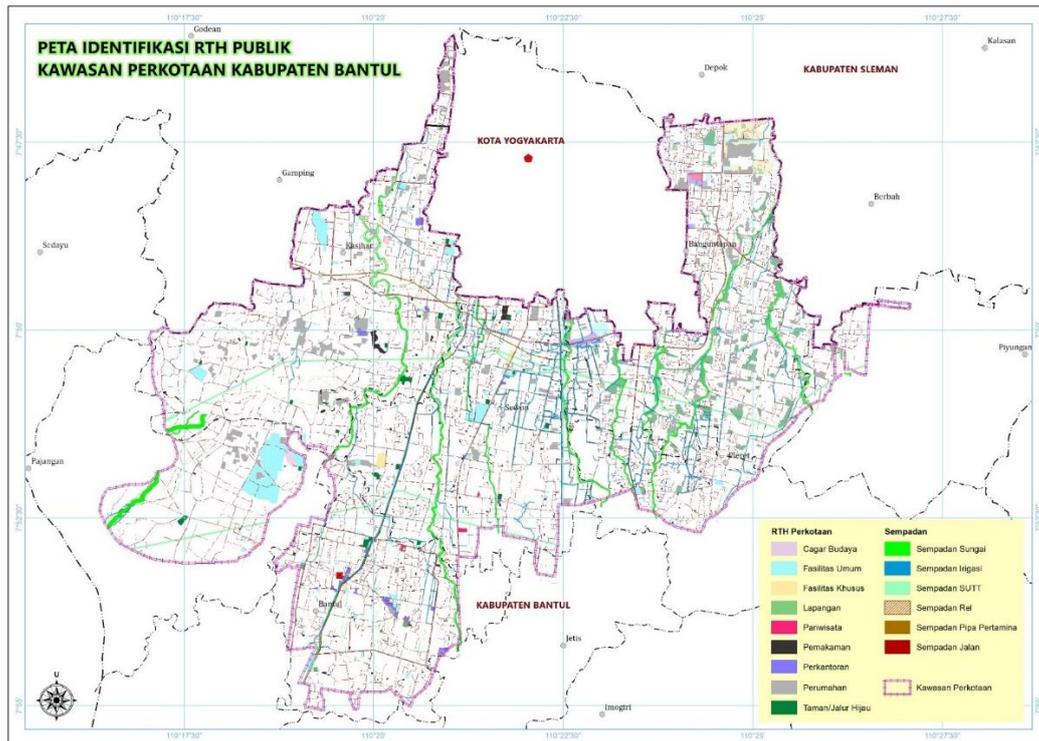
Tabel 2 52 Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bantul

No.	Jenis RTH		Luas RTH (Ha)
1	BANGUNAN	Perumahan	132,61
		Perkantoran (pemerintah dan swasta)	26,05
		Fasilitas Umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosbud)	113,42

No.	Jenis RTH		Luas RTH (Ha)
		Sub total	272,08
2	LINGKUNGAN	Lapangan	32,03
		Permakaman	81,93
		Taman Kelurahan	230,63
		Taman Kapanewon	9,58
		Taman Kota	1,51
		Wanadesa	5,51
		Sub total	361,2
3	PERKOTAAN	Sempadan Jalan	630,43
		Taman/jalur hijau	3,86
		Sub total	634,3
4	FUNGSI TERTEPENTU	Sempadan SUTT	107,09
		Sempadan Rel	1,12
		Sempadan Sungai	254,88
		Sempadan Irigasi	88,92
		Sempadan Danau/Telaga Desa	3,63
		Pariwisata	15,19
		Sempadan Pipa Pertamina	14,03
		Cagar Budaya	11,87
		Gardu Induk PLN	3,1
		Hankam	23,86
		IPAL	7,39
		TPST	0,17
		Sub total	531,25
		Total Luas RTH	
Luas Wilayah			19.873,00
Luas Kawasan Perkotaan			12.544,00
% Luas Kawasan Perkotaan			63,12
RTH Kawasan Perkotaan (%)			14,34

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021 , diolah

Dari tabel dapat kita lihat RTH Kawasan perkotaan di Kabupaten Bantul baru seluas 14,34%, Angka tersebut menunjukkan bahwa RTH di Kabupaten Bantul belum memenuhi standar luasan RTH yang telah ditetapkan. Peta identifikasi RTH disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2020

Gambar 2 42 Peta Identifikasi RTH Publik Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul Tahun 2019

h. Penanganan Air Limbah

Air limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua yaitu grey water dan black water. Air limbah yang termasuk dalam kategori grey water adalah air limbah rumah tangga berupa limbah cucian dapur, cucian pakaian (sabun), dan air buangan dari kamar mandi. Sedangkan yang termasuk dalam black water adalah, tinja manusia, urine, air penggelontor, kertas pembersih, dan air pembersih. Secara umum dari hasil survey air limbah relatif terkelola dengan baik. Limbah rumah tangga selain tinja masuk dalam saluran air limbah ataupun sumur peresapan, sedangkan limbah tinja terkelola dengan tangki septik ataupun IPAL Komunal.

Pengelolaan air limbah ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan terutama pada air tanah. Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kesadaran masyarakat akan kesehatan,

sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada.

Tabel 2 53 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2020

No	Jenis	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi	
				Berfungsi	Tdk berfungsi
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	SPALD-Setempat				
1	Berbasis komunal				
	- MCK Komunal	unit	-		-
2	Truk Tinja	unit	2	√	
3	IPLT : kapasitas	m ³ /hari	50	√	
	SPALD-Terpusat				
1	Berbasis komunal				
	- Tangki septik komunal >10KK	unit	-	-	-
	- IPAL Komunal	Unit/kk	170/ 12.521	√	-
2	IPAL Kawasan/Terpusat				
	- Kapasitas	kk	3.000	√	-
	- Sistem		-	-	-

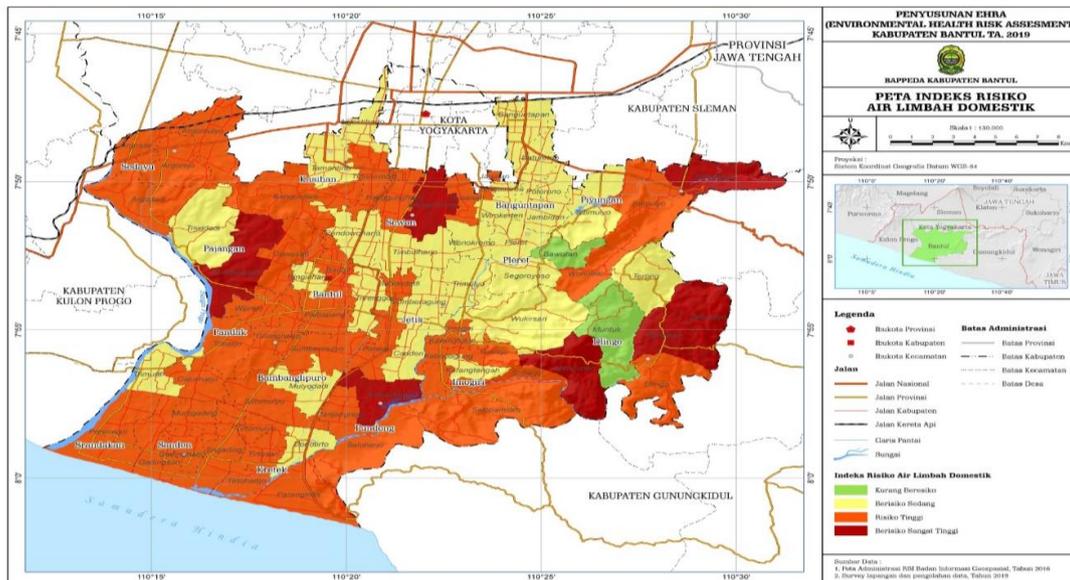
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Berdasarkan data kondisi Pengelolaan Air Limbah Domestik menunjukkan bahwa prasarana dan sarana yang terbangun sampai 2020 ini masih berfungsi dengan baik. Penanganan pengelolaan air diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah di IPAL Sewon.

Berdasarkan Studi EHRA (2019), ditinjau dari sanitasi air limbah domestik Kabupaten Bantul terbagi menjadi 2 zona tingkat risiko sanitasi yang menunjukkan skala 4 dan 3, yaitu :

- (1) Risiko Sangat Tinggi (skala 4) , yang meliputi Kalurahan Srihardono, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Temuwuh,

- Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Srimartani, Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Sendangsari
- (2) Risiko Tinggi (skala 3), yang meliputi Kalurahan Poncosari, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Tirtoharjo, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan, Tirtosari, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Panjangrejo, Kalurahan Sidomulyo, Kalurahan Sumbermulyo, Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Gilangharjo, Kalurahan Wijirejo, Kalurahan Palbapang, Kalurahan Bantul, Kalurahan Sabdodadi, Kalurahan Patalan, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Sriharjo, Kalurahan Kebonagung, Kalurahan Girirejo, Kalurahan Karang Talun, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Wonolelo, Kalurahan Tamanan, Kalurahan Jagalan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Bangunjiwo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kalurahan Guwosari, Kalurahan Argodadi, Kalurahan Argorejo, Kalurahan Argosari, Kalurahan Argomulyo.



Sumber: Studi EHRA, Bappeda, 2019

Gambar 2 43 Peta Indeks Risiko Air Limbah Domestik

i. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 54 Indikator Kinerja Utama Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (%)	82,79	74,18	74,58	75,10	75,42
Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik (%)	80	80	84	84	84
Persentase kecukupan air irigasi (%)	81,12	81,16	80,44	82,19	80,01
Persentase Penanganan Banjir (%)	20,30	24,90	28,84	34	41,31
Jumlah Dokumen Tata Ruang yang sudah diperdakan	-	2	2	2	2
Persentase Cakupan Pengendalian Tata (%)	-	71	70,35	72,5	75,01

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Penduduk Berakses Air Bersih

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di daerah yang rawan air bersih. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air layak pada tahun 2019 mencapai 96,81% dari target 100%. Hal ini menunjukkan belum tercapainya nilai target pemenuhan akses air layak di Kab. Bantul.

Air layak di Kabupaten Bantul dari segi kualitas, kontinuitas, dan jangkauan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga salah satu

upaya pemenuhannya dapat dilakukan dengan penambahan sambungan rumah. Layanan sambungan rumah yang telah dipasang oleh PDAM sebanyak 33.886 SR dengan pengelolaan 15 SPAM. Pada beberapa rumah tangga di Kapanewon Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

b. Lingkungan Permukiman Kumuh

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi dengan luas 79,58 Ha.

Tabel 2 55 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		Penanganan	
			Kalurahan	Kapanewon	Tahun	%
1	Gandekan	1,27	Bantul	Bantul	2017-2018	100%
2	Deresan	2,76	Ringinharjo	Bantul	-	0%
3	Mandingan	2,31	Ringinharjo	Bantul	-	0%
4	Soropaten	0,71	Ringinharjo	Bantul	2017	100%
5	Karangmojo	2,96	Trirenggo	Bantul	2017	100%
6	Kweden	0,91	Trirenggo	Bantul	-	0%
7	Jaranan	0,34	Banguntapan	Banguntapan	2019	100%
8	Jomblang	3,60	Banguntapan	Banguntapan	2017	100%
9	Blado	15,77	Potorono	Banguntapan	2017-2018	100%
10	Semoyan	1,91	Singosaren	Banguntapan	2017	100%
11	Dladan	2,70	Tamanan	Banguntapan	2017	100%
12	Ngewotan	16,97	Ngestiharjo	Kasihan	2018	100%
13	Gonjen	3,92	Tamantirto	Kasihan	2018	100%
14	Kalipakis	1,11	Tirtonirmolo	Kasihan	2017	100%
15	Salakan	2,45	Bangunharjo	Sewon	2017	100%
16	Glugo	4,37	Panggunharjo	Sewon	2017	100%
17	Cepit	11,71	Pendowoharjo	Sewon	2018	100%
18	Pacetan	2,18	Pendowoharjo	Sewon	2017	100%
19	Pendowo	1,66	Pendowoharjo	Sewon	2017	100%
	Total	79,58				92,49%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Penanganan kawasan kumuh dengan gerakan nasional 100-0-100 diantaranya tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%. Tahun 2018, upaya penanganan kawasan kumuh Kabupaten Bantul telah mencapai 92,06%. Kemudian pada tahun 2019, terdapat penambahan penanganan di Padukuhan Jaranan Banguntapan sehingga total penanganan hingga tahun 2019 mencapai 92,49%. Terdapat kekurangan penanganan di Padukuhan Deresan Kalurahan Ringinharjo, Padukuhan Mandingan Kalurahan Ringinharjo dan Padukuhan Kweden Kalurahan Tlirenggo.

Selanjutnya untuk mewujudkan nol persen kawasan kumuh, pada tahun 2020 dilakukan peninjauan kembali kondisi kekumuhan. Berdasarkan hasil review ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 193 Tahun 2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan dengan lokasi Kawasan kumuh. Lokasi Kawasan kumuh ada di 31 Kalurahan pada 7 Kapanewon dengan luas 330,26Ha.

c. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bangunan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian secara teknis maupun non teknis. Kriteria atau persyaratan yang dimaksud, yaitu keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Tabel 2 56 Realisasi Pembangunan RTLH di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Sumber Anggaran RTLH	2016	2017	2018	2019	2020
BSPS (Unit)	652	365	959	1365	1577
DAK (Unit)	-	-	150	176	139
APBD I (Unit)	-	582	517	443	-
APBD II (Unit)	-	-	171	83	-
Total	652	947	1794	2067	1716

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Realisasi pembangunan RTLH mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari Tahun 2018 ke 2019, menunjukkan peningkatan sebesar 15% menurun di tahun 2020.

Realisasi pembangunan RTLH mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari Tahun 2018 ke 2019, menunjukkan peningkatan sebesar 15% namun menurun di tahun 2020. Sampai tahun 2020 ini realisasi kurang lebih hampir di angka 59%. Akan tetapi berjalannya waktu, karena pandemi, masuk dalam anggaran refocusing. Pada APBD II di refocusing untuk penanganan Covid-19. Dan pada APBD I tidak dianggarkan.

d. Fasilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan terhadap penanganan perumahan bagi MBR yaitu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara kewenangan pemerintah kabupaten antara lain penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.

Kebijakan pembangunan perumahan selain untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, juga untuk mengatasi backlog rumah dan mengurangi kawasan kumuh perkotaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman sederhana sehat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan bantuan stimulan pembangunan sarana prasarana lingkungan seperti jalan lingkungan, drainase dan jembatan. Pembangunan Rusunawa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh perkotaan dan menyediakan perumahan yang layak bagi MBR.